

**ANALISIS SEKTOR BASIS NON MIGAS DAN POTENSIAL  
SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**AINUL YAQIN  
NIM. 1323203040**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ainul Yaqin**

NIM : **1323203040**

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Sektor Basis Non Migas dan Potensial Sebagai Prioritas Pembangunan Ekonom Daerah Kabupaten Cilacap**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecualipada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

IAIN PURW



## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### ANALISIS SEKTOR BASIS NON MIGAS DAN POTENSIAL SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN CILACAP

Yang disusun oleh Saudara **Ainul Yaqin NIM. 1323203040** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syaria'h** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 28 juni 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang/Penguji



Iin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji



Rahmini Hadi, S.E, M.Si  
NIP. 19701224 200501 2 001

Pembimbing/Penguji



Chandra Warsito, S.E, S.TP, M.Si  
NIP. 19790323 201101 1 007

Purwokerto, Juli 2018

Mengesahkan



Dr. H. Abdul Anwarudin Aziz, M.M.  
NIP. 1980403 199403 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Ainul Yaqin NIM. 1323203040 yang berjudul:

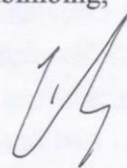
**ANALISIS SEKTOR BASIS NON MIGAS DAN POTENSIAL  
SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

IAIN PU

Purwokerto, 14 Mei 2018  
Pembimbing,



**Chandra Warsito, S.TP., M.Si**  
NIP. 197903232011011007

**THE ANALYSIS OF NON-OIL AND GAS-BASED SECTOR AND ITS  
POTENTIAL AS ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITY IN  
*KABUPATEN CILACAP***

**AINUL YAQIN  
NIM 1323203040**

Email: adam.yaqin@gmail.com  
Department of Islamic Economics Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

The development of local economy is an integral part of national economic development. *Kabupaten Cilacap* is a region which has a dualistic economic structure. It has given a significant contribution, around 70 %, on oil and gas sector of GRDP while the rest was obtained from non-oil and gas sector. The dualism is due to the existence of oil and gas refinery in *Kabupaten Cilacap*. The oil and gas sector in *Kabupaten Cilacap* has significant roles which cause major differences on local economic productivity, especially between oil and gas GRDP and non-oil and gas GRDP that cause inequality sector..

This research used descriptive quantitative approach and the data that was used was the secondary data (time series) 2014-2016 which was gotten from BPS Cilacap and Central Java Province. The methode of the data analysis which was used in determining the sectors of non-oil and gas-based and potentially economy in Cilacap Regency was *Location Quotient (LQ)* and *Klassen Typology* analysis.

The results of the study showed that LQ analysis identified two base sectors and other non-base sectors. Meanwhile, the results of *Klassen Typology* analysis showed that there were three advanced and fast growing sectors, two advanced but pressured sectors, ten rapidly growing sectors, and two relatively underdeveloped sectors.

Keyword: **local economic development, Gross Regional Domestic Product (GRDP), *Location Quotient (LQ)* Analysis, *Klassen Typology* Analysis**

# **ANALISIS SEKTOR BASIS NON MIGAS DAN POTENSIAL SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN CILACAP**

AINUL YAQIN  
NIM. 1323203040

Email: [adam.yaqin@gmail.com](mailto:adam.yaqin@gmail.com)  
Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang memiliki struktur ekonomi yang dualistik. Dalam kontribusinya terhadap PDRB sektor Migas menyumbang cukup besar pada kisaran 70 persen, dan sisanya disumbang oleh sektor non Migas. Dualisme tersebut merupakan konsekuensi keberadaan industri kilang Migas di Kabupaten Cilacap. Peranan sektor Migas di Kabupaten Cilacap sangat besar sehingga tampak adanya perbedaan produktifitas yang menonjol pada kinerja ekonomi daerah, khususnya antara PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa Migas yang menyebabkan ketimpangan sektoral.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dan data yang digunakan berupa data sekunder *time series* 2014-2016 yang diperoleh dari BPS Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan dalam menentukan sektor-sektor ekonomi basis non Migas dan potensial di Kabupaten Cilacap adalah *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Klassen Typology*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis LQ mengidentifikasi dua sektor basis dan yang lainnya merupakan sektor non basis. Kemudian hasil analisis *Klassen typology* menunjukkan bahwa yang masuk dalam klasifikasi *Sektor maju dan berkembang cepat* terdapat tiga sektor, *Sektor maju tapi tertekan* terdapat dua sektor, *Sektor berkembang cepat* terdapat sepuluh sektor, *Sektor relatif tertinggal* terdapat dua sektor.

**Kata Kunci:** **Pembangunan Ekonomi daerah, PDRB, Analisis *Location Quotient (LQ)*, Analisis *Klassen Typology*.**

## MOTTO

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya”.*

*(H.R. Thabrani dan Daruquthni)*

“Hiduplah untuk lebih bermanfaat, agar berasa lebih hidup”.

(Ainul Yaqin)



## PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemurahan-Nya. Tugas akhir skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

- ❖ *Bapak dan Ibu tercinta (A. Shomad dan Dasyati) yang selalu memberikan do'a tulusnya, perhatian, dukungan, dan kasih sayangnya serta yang tak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk anaknya.*

*Kubingkiskan skripsi ini untuk:*

- *Kaka Arif dan Teh Umi beserta keponakan saya tersayang Hasan Nur Ali yang telah banyak membantuku.*
- *kedua Adikku tercinta (Uswatun dan Aisya) yang memberikan do'a, semangat, dukungan dan perhatiannya.*
- *Orang-orang spesial yang selalu ada dan telah memberikan motivasi serta bantuannya.*

IAIN PURWOKERTO



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze(Dengan Titik Di Atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	ṡad	ṡ	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (Dengan Titik Di Bawah)
ط	ṡa'	ṡ	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (Dengan Titik Di Bawah)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik Di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

## C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūḍ</i>

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan Semesta Alam Yang Maha Mangetahui segala sesuatu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjunan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini merupakan penelitian mengenai analisis sektor basis non Migas dan potensial selama periode 2014-2016 untuk menjadi prioritas pembangunan ekonomi sebagai arah strategi pembangunan di Kabupaten Cilacap pada periode selanjutnya.

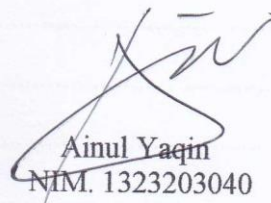
Selama penyusunan skripsi ini penyusun menyadari tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika penyusun menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan izin penyusunan skripsi ini.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan saran dan masukannya.

4. Chandra Warsito, S.TP., M.Si, sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabarannya membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
5. Seluruh dosen FEBI IAIN Purwokerto yang tidak dapat disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat atas ilmu yang telah di *transfer* dalam perkuliahan atau luar perkuliahan.
6. Arifatul Hidayah (Bu Ifah) dkk. selaku admin Jurusan Ekonomi Syariah yang telah membantu terkait administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bambang Nugroho sebagai Kasi IPDS di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap yang telah memberikan bantuan dalam penyediaan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua yang tidak pernah berhenti memberikan do'a, perhatian, motivasi serta segala upaya dalam memberikan dukungan.
9. Kakak (sekeluarga) dan Adik yang telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan.
10. Keluarga Bi Dirah (Fajar dan Nurul) yang telah memberikan do'a dan bantuannya.
11. Keluarga Habib Hasan bin Alwi Alattas Karanggendot Majenang.
12. Keluarga besar Ponpes Miftahul Faizin Kapek-Bantarpanjang.
13. Teman- temanku Angkatan 2013 Ekonomi Syariah B, terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya.
14. Teman-teman seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) IAIN Purwokerto, salam YAKUSA (yakin usaha sampai)

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian, terimakasih penulis sampaikan kembali kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga bantuan tersebut dapat menjadi amal baik yang diperhitungkan oleh Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan. Namun demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.



Purwokerto, 14 Mei 2018

Ainul Yaqin  
NIM. 1323203040



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR ISI

HALAMAN	
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Pembangunan Ekonomi .....	19
1. Definisi Pembangunan Ekonomi.....	19
2. Paradigma Pembangunan Ekonomi.....	20
B. Landasan Teologis Pembangunan Ekonomi.....	26
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	30
1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto .....	30
2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto .....	31
3. Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	31

4. Ruang Lingkup Lapangan Usaha .....	33
D. Teori Basis Ekonomi .....	42
E. Kebijakan dan Strategi Pembangunan.....	44
1. Peranan Pemerintah.....	44
2. Strategi Pembangunan .....	45
3. Strategi Industrialisasi .....	47
F. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	54
4. Pembangunan Ekonomi Daerah .....	54
5. Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	55
G. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah.....	57
H. Kerangka Berfikir .....	58

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	61
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	61
C. Metode Pengumpulan Data .....	62
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	62
1. Populasi .....	62
2. Sampel .....	63
E. Variable Penelitian .....	63
F. Metode Analisis Data .....	65

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	68
1. Letak Geografis .....	68
2. Visi dan Misi .....	68
3. Potensi Ekonomi Daerah.....	69
B. Pembahasan .....	77
1. Sektor Dominan Kabupaten Cilacap 2014-2016.....	77
2. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Cilacap 2014-2016 .....	79
3. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten	

Cilacap 2014-2016 .....	82
4. Pembahasan Per Sektor Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2016 .....	85
5. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Hasil Penelitian.....	102
6. Sektor Basis dan Potensial Sebagai Prioritas dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Cilacap.....	106
7. Rekomendasi Arah Pembangunan.....	108

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kontribusi PDRB Kabupaten Cilacap ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha dengan Migas 2014-2016 .....	3
Tabel 2	Kontribusi PDRB Kabupaten Cilacap ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas 2014-2016 .....	4
Tabel 3	Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4	Tiga Fungsi Negara/Pemerintah .....	29
Tabel 5	Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 .....	32
Tabel 6	Rumus Klasifikasi Sektor Ekonomi Menurut <i>Klassen Typology</i> .....	67
Tabel 7	Kontribusi PDRB Kabupaten Cilacap ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas 2014-2016 .....	77
Tabel 8	Hasil perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ) Kabupaten Cilacap .....	80
Tabel 9	Rumus Klasifikasi Sektor Ekonomi Menurut <i>Klassen Typology</i> .....	82
Tabel 10	Perhitungan Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Menurut Metode <i>Klassen Typology</i> .....	83
Tabel 11	Hasil Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Periode 2014-2015 .....	84
Tabel 12	Analisis Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2016 .....	86
Tabel 13	Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian .....	88
Tabel 14	Analisis Sektor Industri Pengolahan .....	89
Tabel 15	Analisis Sektor Pengadaan Listrik dan Gas .....	90
Tabel 16	Analisis Sektor Pengadaan Air .....	90
Tabel 17	Analisis Sektor Kontruksi .....	91
Tabel 18	Analisis Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor .....	92
Tabel 19	Analisis Sektor Transportasi dan Pergudangan .....	93
Tabel 20	Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum .....	94
Tabel 21	Analisis Sektor Informasi dan Komunikasi .....	95

Tabel 22	Analisis Sektor Jasa Keuangan .....	96
Tabel 23	Analisis Sektor Real Estate .....	97
Tabel 24	Analisis Sektor Jasa Perusahaan .....	98
Tabel 25	Analisis Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib .....	99
Tabel 26	Analisis Sektor Jasa Pendidikan.....	100
Tabel 27	Analisis Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial .....	101
Tabel 28	Analisis Sektor Jasa Lainnya.....	101



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Kerangka Berfikir ..... 60



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Riset
- Lampiran 2 Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha dengan Migas
- Lampiran 3 Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas
- Lampiran 4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas
- Lampiran 5 Kontribusi PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha dengan Migas
- Lampiran 6 Tabel Perhitungan Analisis LQ 2014
- Lampiran 7 Tabel Perhitungan Analisis LQ Tahun 2015-2016
- Lampiran 8 Tabel Perhitungan *Klassen Typology* Tahun 2015-2016
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua negara yang sedang berkembang mempunyai perekonomian yang dualistik. Di satu pihak berekonomi pasar, dan pihak lain berekonomi pertanian; yang pertama di dan dekat kota, sedang yang lain di daerah pedesaan; yang satu maju, yang lain kurang maju.<sup>1</sup>

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai cita-cita luhur bangsa Indonesia, Pembangunan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian penting bagi pembangunan secara menyeluruh.

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 telah mengubah kebijakan dengan pemberlakuannya desentralisasi dalam pembangunan daerah. Dari UU tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah secara berkesinambungan dan merata.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki

---

<sup>1</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 24.



setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan.<sup>2</sup>

Pemahaman umum tentang potensi daerah/wilayah, adalah faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh daerah/wilayah tertentu yang dapat digunakan dan bermanfaat guna pembangunan daerah. Dalam kajian pembangunan wilayah, yang dimaksud potensi wilayah berkaitan langsung dengan sumber daya yang dimiliki daerah terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.<sup>3</sup>

Dalam perekonomian regional Jawa Tengah berdasarkan peringkat PDRB ADHB kabupaten/kota Se-Jawa Tengah tahun 2014, Kabupaten Cilacap menduduki ranking kedua dengan nilai kontribusi sebesar 92,50 triliun rupiah (10,13 persen dari total 912,97 triliun rupiah) di bawah Kota Semarang. Hal itu menunjukkan bahwa, peran perekonomian daerah khususnya Kabupaten Cilacap dalam menciptakan PDRB regional Jawa Tengah cukup dominan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Cilacap kita dapat mengetahui tentang sumber aktifitas ekonomi yang telah menjadi penyumbang bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap secara rinci. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ataupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga dan pendapatan terus menerus bertambah.<sup>4</sup> Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha pada penelitian ini menggunakan PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) yang membagi klasifikasi PDRB menjadi beberapa kategori yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Perdagangan dan Jasa; dan Listrik dan Gas.

---

<sup>2</sup> Syafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, (Jakarta: Prisma,1997), hlm.

<sup>3</sup> Ambari U.M dan Socia P.,*Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengembangan Wilayah, 2002), hlm.

<sup>4</sup>Juarsa Badri, "Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok", *Ipteks Terapan*, Vol. 8, i4, 2015. Hlm. 223. Diakses 25 Maret 2017, 11.08.25

Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.<sup>5</sup> Berikut adalah tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dengan migas dan tanpa migas.

Tabel 1. Kontribusi Produk Domestik Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Dengan Migas Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah dan Persen)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.030.826,1	7,23	6.405.712,7	7,25	6.604.527,0	7,12
B	Pertambangan dan Penggalian	2.338.906,0	2,80	2.345.647,8	2,66	2.348.588,3	2,53
C	Industri Pengolahan	58.831.986,8	<b>70,55</b>	62.208.167,6	<b>70,41</b>	65.306.911,6	<b>70,36</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	52.780,0	0,06	60.848,0	0,07	70.413,0	0,08
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.270,4	0,04	31.300,9	0,04	31.940,4	0,03
F	Konstruksi	3.730.933,1	4,47	3.997.282,7	4,52	4.358.149,7	4,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.114.354,5	4,93	4.364.309,2	4,94	4.652.880,6	5,01
H	Transportasi dan Pergudangan	2.028.563,5	2,43	2.228.324,1	2,52	2.329.629,6	2,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	787.181,3	0,94	844.767,3	0,96	885.068,2	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	1.253.535,0	1,50	1.416.984,6	1,60	1.515.055,3	1,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	615.958,4	0,74	662.798,3	0,75	716.562,8	0,77
L	Real Estate	680.423,8	0,82	730.538,8	0,83	774.942,9	0,83
M,N	Jasa Perusahaan	109.128,3	0,13	119.733,9	0,14	128.885,0	0,14
O	Administrasi	865.731,9	1,04	920.791,1		942.985,3	

<sup>5</sup>PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2012-2016, Tahun 2017, hlm. 6

Kategori	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	1.113.730,2	1,34	1.158.706,0	1,31	1.238.907,7	1,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240.651,9	0,29	263.244,9	0,30	289.864,1	0,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	565.538,3	0,68	588.446,5	0,67	625.050,7	0,67
	<b>PDRB</b>	<b>83.391.500,2</b>	<b>100,00</b>	<b>88.347.606,7</b>	<b>100,00</b>	<b>92.820.362,2</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2. Kontribusi Produk Domestik Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah dan Persen)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.030.826,1	16,44	6.405.712,7	16,54	6.604.527,0	16,24
B	Pertambangan dan Penggalian	2.338.906,0	6,37	2.345.647,8	6,06	2.348.588,3	5,78
C	Industri Pengolahan	12.134.375,6	33,07	12.580.130,5	32,49	13.147.441,8	32,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	52.780,0	0,14	60.848,0	0,16	70.413,0	0,17
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.270,4	0,09	31.300,9	0,08	31.940,4	0,08
F	Konstruksi	3.730.933,1	10,17	3.997.282,7	10,32	4.358.149,7	10,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.114.354,5	11,21	4.364.309,2	11,27	4.652.880,6	11,44
H	Transportasi dan Pergudangan	2.028.563,5	5,53	2.228.324,1	5,76	2.329.629,6	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	787.181,3	2,15	844.767,3	2,18	885.068,2	2,18
J	Informasi dan Komunikasi	1.253.535,0	3,42	1.416.984,6	3,66	1.515.055,3	3,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	615.958,4	1,68	662.798,3	1,71	716.562,8	1,71
L	Real Estate	680.423,8	1,85	730.538,8	1,89	774.942,9	1,91
M,N	Jasa Perusahaan	109.128,3	0,30	119.733,9	0,31	128.885,0	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	865.731,9	2,36	920.791,1	2,38	942.985,3	2,32

Kategori	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
P	Jasa Pendidikan	1.113.730,2	3,04	1.158.706,0	2,99	1.238.907,7	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240.651,9	0,66	263.244,9	0,68	289.864,1	0,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	565.538,3	1,54	588.446,5	1,52	625.050,7	1,54
<b>PDRB</b>		<b>36.693.889,0</b>	<b>100,00</b>	<b>38.719.569,6</b>	<b>100,00</b>	<b>40.660.892,5</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Cilacap (diakses tahun 2017)

Melihat pada dua tabel di atas, dari struktur ekonomi Kabupaten Cilacap yang paling dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB dengan migas maupun non migas adalah sektor Industri Pengolahan; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Dan sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Tiga kategori ekonomi dominan adalah tiga kategori yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten/Kota tersebut. Tiga kategori tersebut menggambarkan corak ekonomi suatu wilayah.<sup>6</sup> Dari penjabaran di atas nilai kontribusi ke tiga sektor tersebut telah mengalami kenaikan, meskipun persentase sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan.

Memahami pembahasan dua tabel di atas Kabupaten Cilacap memiliki permasalahan, yakni perbedaan yang menonjol antar sektor khususnya sektor Migas dengan sektor yang lainnya dalam kontribusinya terhadap PDRB. Dualisme tersebut merupakan konsekuensi keberadaan industri kilang Migas di Kabupaten Cilacap. Peranan sektor Migas di Kabupaten Cilacap sangat besar sehingga tampak adanya perbedaan produktivitas yang menonjol pada kinerja ekonomi daerah, khususnya antara PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa Migas. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral dan pendapatan perkapita.<sup>7</sup>

Dualisme ekonomi diperkuat dengan adanya kecenderungan sektoral dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul oleh

<sup>6</sup>“*Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2014*”, BAPPEDA dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Oktober 2015. hlm. 9.

<sup>7</sup>“*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap 2012-2017*”, No. 5, Tahun 2013. hlm. IV-10. Diakses tanggal 18 Maret 2017, 12.41.37.

sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Meski sektor-sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja, namun sektor Industri pengolahan (Migas) yang memiliki kontribusi paling besar dalam PDRB. Ketimpangan antar sektor juga berdampak pada ketimpangan wilayah, hal ini disebabkan karena sektor Industri Pengolahan (Migas dan industri besar) terkonsentrasi di kecamatan tertentu saja, sedang sektor yang lain tersebar di semua kecamatan.

Dan itu menunjukkan bahwa perlunya pengembangan sektor basis non Migas, untuk meminimalisir ketimpangan antar sektor. Sebab dari pemerataan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, akan mengurangi tingkat kecenderungan tidak seimbang pendapatan riil perkapita dan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, dorongan dari sektor-sektor potensial non Migas yang masih belum maksimal atau belum dikembangkan lebih lanjut dalam pemanfaatannya oleh pemerintah daerah dan masyarakat, harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun kebijakan strategi pembangunan ekonomi daerah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata.

Berdasarkan uraian di atas Kabupaten Cilacap memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik, namun disertai dengan ketimpangan produktivitas antar sektor. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya dalam kegiatan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah dalam perspektif Islam dengan judul “Analisis Sektor Basis Non Migas dan Potensial sebagai Prioritas Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Cilacap”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi perhatian penulis dalam masalah ini adalah :

1. Bagaimana menganalisis sektor-sektor ekonomi non migas yang menjadi sektor basis dan potensial di Kabupaten Cilacap periode 2014-2016?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam prioritas pembangunan ekonomi daerah guna mewujudkan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Cilacap yang berkelanjutan dan merata?

### C. Definisi Operasional

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.

2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur perekonomian suatu Negara di cerminkan oleh kontribusi sektoral di dalam pendapatan nasional.<sup>8</sup> Struktur ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang mencakup Sektor ekonomi (lapangan Usaha) yang terbagi menjadi beberapa sektor menurut PDRB tahun dasar 2010 (KBLI 2009) yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

3. Sektor Basis non Migas

Sektor Basis non Migas adalah sektor ekonomi (tanpa industri batu bara dan industri pengilangan Migas)<sup>9</sup> yang mampu melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang berkaitan.

---

<sup>8</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 13.

<sup>9</sup>“*Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2016*”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Agustus 2017. hlm. 56.

#### 4. Sektor Potensial

Sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam suatu wilayah. Hal ini dapat diukur dengan analisis *Klassen Typology* jika sektor ekonomi masuk dalam klasifikasi sektor sedang tumbuh (*growing sector*) dan sektor maju tetapi tertekan (*retarded sector*) maka sektor tersebut termasuk sektor potensial untuk dikembangkan.

#### 5. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>10</sup>

#### 6. Ekonomi Pembangunan Islam (Syariah)

Ekonomi pembangunan Islam (syariah) adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>11</sup>

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian mengenai Analisis Pengembangan Sektor Basis Non Migas dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sektor ekonomi basis non Migas dan potensial di Kabupaten Cilacap
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam prioritas pembangunan ekonomi daerah guna mewujudkan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Cilacap yang berkelanjutan dan merata.

---

<sup>10</sup>Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 298.

<sup>11</sup>Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 13.

Melalui penelitian Analisis Sektor Basis Non Migas dan Potensial sebagai Prioritas Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Cilacap diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Penyusun
  - a. Menambah khasanah keilmuan tentang pembangunan ekonomi daerah.
  - b. Dapat berpikir kritis untuk menganalisa hasil penelitian.
  - c. Mengetahui secara detail materi dan objek yang diteliti.
2. Bagi Bappeda Cilacap
  - a. Sebagai tambahan bahan evaluasi agar Bappeda lebih baik lagi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di masa yang akan datang.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan mengenai kebijakan yang diambil dalam strategi pembangunan daerah
  - c. Diharapkan dapat membantu Bappeda dalam mengidentifikasi isu strategis sehingga tepat dan optimal dalam pencapaian misi dan visi.
3. Bagi IAIN Purwokerto
  - a. Dapat menambah referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pembangunan ekonomi daerah
  - b. Menambah khasanah keilmuan mengenai penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang merata dan berkelanjutan (*sustainability*).

## **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 75.



Dalam Liontin Arsyad dengan modulnya yang berjudul “Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi” menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai sifat berikut:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Peningkatan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).<sup>13</sup>

Menurut Todaro tujuan dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Lioncin Arsyad dengan bukunya yang berjudul “Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah” menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Dan juga dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh

---

<sup>13</sup> Lioncin Arsyad, *Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi*, Ekonomi Pembangunan Modul 1, t.t. hlm. 1.22.

karena itu pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam Suparmoko dengan judul bukunya “Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan daerah)” menjelaskan bahwa potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Dalam Juarsa Badri dengan judul artikel “ Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok” menyebutkan, pembangunan ekonomi daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumberdaya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Mushoffa dengan judul “Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal”. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sektor basis yang ada di tingkat kecamatan sebagai strategi pembangunan potensi daerah melalui pengembangan teknologi, sarana prasarana, pengembangan SDM & pelatihan *soft skill*, modal, pengawasan dan sosialisasi sektor potensial.<sup>16</sup>

Sri Endang Kornita dengan judul “Analisis Ekonomi Basis dan Potensi Sinergi Pembangunan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang percepatan pembangunan daerah dengan

---

<sup>14</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 99.

<sup>15</sup> Juarsa Badri, “Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok”, VIII, Hlm.222.

<sup>16</sup> Mushoffa, *Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Tegal*. Skripsi ekonomi. UNNES Semarang. 2009. hlm.Viii.

melihat peluang sektor basis yang dapat bersinergi antar kedua wilayah di Kabupaten/Daerah sebagai strategi dalam penerapan kebijakan pemerintah.<sup>17</sup>

Moh. Fathoni Santoso dengan judul “Identifikasi Potensi sektor Ekonomi Basis dan Non Basis Kota Kediri tahun 2009-2013”. Penelitian ini membahas tentang identifikasi sektor basis dan non basis dengan menggunakan metode Location Quotient (DLQ) untuk memprediksi sektor basis dan non basis manakah yang kemungkinan mengalami perubahan yang lebih baik, tetap/stagnan, atau bahkan keadaannya menjadi lebih buruk. Berdasarkan hasil analisis LQ diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan satu-satunya sektor ekonomi basis kota Kediri tahun 2009-2013, hasil analisis DLQ menunjukkan sektor ini diprediksi berpotensi tetap menjadi sektor basis dimasa mendatang. Dari keseluruhan sembilan sektor perekonomian di Kota Kediri enam diantaranya teridentifikasi diprediksi menjadi sektor basis di masa mendatang, sementara tiga sektor lain yakni 1) sektor pertanian; 2) sektor pertambangan dan penggalian; 3) sektor perdagangan, hotel dan restoran teridentifikasi kemungkinan menjadi sektor non basis di masa mendatang.<sup>18</sup>

Asmuni Mth. dengan judul “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas tentang konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam dari para teorikus ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi yang merespon aspek moral dengan cara mengkaitkan pembangunan ekonomi dengan Agama, yaitu: sistem ekonomi yang menganjurkan manusia mengabdikan kepada Allah SWT. Bukan mengabdikan kepada kepentingan pribadi.<sup>19</sup>

Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri “Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Penelitian ini membahas tentang penentuan sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah dengan berbagai metode

---

<sup>17</sup>Sri Endang Kornita, *Analisis Ekonomi Basis dan Potensi Sinergi Pembangunan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru*. Skripsi Ekonomi. Universitas Riau. 2008. hlm. Vii.

<sup>18</sup>Moh Fathoni Santoso, *Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Basis dan Non Basis Kota Kediri tahun 2009-2013*. Skripsi Ekonomi. UNESA Surabaya. 2015, hlm. 1.

<sup>19</sup>Asmuni Mth, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. Jurnal *Al-Mawardi*, Edisi X tahun 2003. hlm. 128

pendekatan analisis yaitu: analisis LQ, Klassen Typology, MRP, tipologi Overlay dan Shift Share. Dari penelitian tersebut dihasilkan dua sektor dominan sebagai sektor unggulan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu: sektor pertanian dan sektor industri manufaktur.<sup>20</sup>

Widi Asih “Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013”. Penelitian ini membahas tentang ketimpangan wilayah antar kecamatan, hubungan pendidikan dengan ketimpangan, hubungan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan ketimpangan pembangunan, hubungan kependudukan dengan ketimpangan pembangunan, dan hubungan pola perekonomian daerah dengan ketimpangan. Dengan teknik analisis tipologi klassen dan analisis regresi data panel.<sup>21</sup>

Muhammad Ghufon “Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini membahas tentang pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Lamongan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan, dampak pengganda (*multiplier*) pendapatan, besarnya peran sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan dan strategi kebijakan yang tepat untuk membangun sektor unggulan daerah. Dengan menggunakan teknik analisis *Location Quotient* (LQ), *multiplier* pendapatan, analisis *Shift Share*, dan analisis Swot.<sup>22</sup>

Agung Eko Purwana “Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam” . Jurnal ini membahas tentang bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam proses pembangunan yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Juga lengkap

---

<sup>20</sup> Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, *Penentu sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 10, nomor 1. 2015, Hlm 34.

<sup>21</sup> Widi Asih, *Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap*. Skripsi Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2015. hlm. Vii.

<sup>22</sup> Muhammad Ghufon, *Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Ekonomi. Institut Pertanian Bogor. 2008. hlm. Iv.

dengan analisis perbandingan model pembangunan ekonomi konvensional dan ekonomi islam.<sup>23</sup>

Moh Tohir “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghozali, Ibn Kholdun dan M. Umer Chapra”. Penelitian ini membahas tentang sejarah pembangunan ekonomi dan pemikiran pembangunan ekonomi islam menurut tokoh-tokoh ekonom Muslim yakni: Al-Ghozali, Ibn Kholdun dan M. Umer Chapra.<sup>24</sup>

Aula Nurul Ma’rifah “Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share* Ditinjau dalam Perspektif Islam (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015)”. Penelitian ini membahas tentang struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam dengan lokasi penelitian di kota Bandar Lampung. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa teridentifikasi 14 sektor yang memiliki peranan besar dalam kontribusinya terhadap PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2011-2014. hal itu direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan ekonomi pemerintah daerah dengan mengedepankan keadilan, kesejahteraan, serta tanggung jawab.<sup>25</sup>

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Mushoffa (2009)	“Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal ”	Objek:PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Metode: analisis LQ Tujuan: pengembangan potensi	Metode: Analisis SWOT Lokasi: Kabupaten Tegal	Menemukan sektor basis dan non basis perekonomian daerah dan strategi pembangunan daerah.

<sup>23</sup> Agung Eko Purnawa, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitis Islamica Vol. 10, No. 1, 2013. Hlm. 1.

<sup>24</sup> Moh Tohir, *Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghozali, Ibn Kholdun, dan M. Umer Chapra*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014. hlm. ix.

<sup>25</sup> Aula Nurul Ma’rifah, “Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendekatan *Location Quotient* dan *Shift Share* Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2014)”, Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. ii.

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		ekonomi daerah		
Sri Endang Kornita (2008)	“Analisis Ekonomi Basis dan Potensi Sinergi Pembangunan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru”.	Objek: PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Metode: LQ Tujuan: pengembangan potensi ekonomi daerah	Metode: Analisis SWOT Lokasi: Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru	Menemukan sektor basis dan non basis dan strategi sinergitas pembangunan daerah
Muh. Fatoni Santoso (2015)	“Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Basis dan Non Basis Kota Kediri tahun 2009-2013”	Objek: PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Metode: LQ Tujuan: pengembangan potensi ekonomi daerah	Metode: DLQ Lokasi: Kota Kediri	Menemukan identifikasi sektor basis dan non basis sebagai pertimbangan Pemda dalam menyusun kebijakan.
Asmuni Mth. (2003)	“Konsep Pembangunan Ekonomi Islam”	Membahas konsep pembangunan ekonomi Islam	Tidak menggunakan obyek PDRB, subyek Pemkab. Dan metode penelitian	Konsep pembangunan Islam dari teorikus Ekonomi Islam, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri (2015)	“Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir”	Objek: PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Metode: analisis LQ dan Klassen Typology Tujuan: pengembangan potensi ekonomi daerah	Metode: MRP, tipologi Overlay dan Shift Share	Menemukan identifikasi sektor basis dan non basis sebagai pertimbangan Pemda dalam menyusun kebijakan.

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Widi Asih (2015)	“Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013”	Objek: PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Cilacap Metode: analisis tipologi kelas Tujuan: pengembangan potensi ekonomi daerah	Subjek: sub wilayah Kecamatan Metode: analisis regresi data panel	Menemukan identifikasi ketimpangan sebagai pertimbangan Pemda dalam menyusun kebijakan
Muhammad Ghufron (2008)	“Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur”	Objek: PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Metode: analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Tujuan: pengembangan potensi ekonomi daerah	Metode: analisis <i>multiplier</i> pendapatan, analisis <i>Shift Share</i> , dan analisis Swot	Menemukan identifikasi sektor basis dan non basis sebagai pertimbangan Pemda dalam menyusun kebijakan
Agung Eko Purnawa (2013)	“Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Membahas tentang konsep pembangunan ekonomi Islam	Tidak menggunakan obyek PDRB, subyek Pemkab. Dan metode penelitian	Konsep pembangunan Islam dari teorikus Ekonomi Islam, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Moh Tohir (2014)	“Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghozali, Ibn	Membahas tentang konsep pembangunan ekonomi Islam	Tidak menggunakan obyek PDRB, subyek Pemkab. Dan metode	Konsep pembangunan Islam dari teorikus Ekonomi Islam, untuk mencapai

Nama Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Kholdun dan M Umer Chapra”		penelitian	keadilan dan kesejahteraan masyarakat
Aula Nurul Ma’rifah (2017)	“Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendekatan <i>Location Quotient</i> dan <i>Shift Share</i> Ditinjau Dalam perspektif Islam (Strudi di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2014”	Objek: PDRB Subjek: Pemerintah Kabupaten Metode: analisis <i>Location Quotient</i> (LQ) Tujuan: pengembangan potensi ekonomi daerah Teori: Ekonomi Islam	Metode: analisis <i>Shift Share</i> Lokasi: Kota Bandar Lampung	Menemukan identifikasi sector basis dan non basis sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan ekonomi daerah dan konsep ekonomi Islam sebagai strategi pembangunan ekonomi

## F. Sistematika Pembahasan

Penyusun skripsi pada awal halaman adalah terdiri dari halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Pada bagian selanjutnya akan dibahas per bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan pustaka tentang landasan teori dengan point yang berurutan, dan masing-masing point terbagi menjadi beberapa subpoint. *Point pertama* mengenai teori pembangunan ekonomi dengan subpoint: definisi pembangunan ekonomi dan paradigma pembangunan



ekonomi. *Point kedua* pembangunan ekonomi perspektif ekonomi Islam. *Point ketiga* produk domestik regional bruto (PDRB) dengan subpoint: pengertian PDRB, kegunaan PDRB, klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha, ruang lingkup lapangan usaha. *Point keempat* teori basis ekonomi. *Point kelima* kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan subpoint: peranan pemerintah, strategi pembangunan, dan strategi industrialisasi. *Point keenam* konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan subpoint: pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Point ketujuh* pengembangan potensi ekonomi daerah. *Point kedelapan* kerangka berpikir.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Dalam bab ini akan membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis data.

Bab keempat ada beberapa point yang akan dibahas pada bab ini yakni berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan analisisnya. Masing-masing point terbagi menjadi beberapa subpoint. *Point pertama* mengenai deskripsi lokasi penelitian dengan subpoint: letak geografis, visi dan misi, dan potensi ekonomi daerah. *Point kedua* pembahasan dengan subpoint: sektor dominan Kabupaten Cilacap 2014-2016, sektor basis dan non basis Kabupaten Cilacap 2014-2016, klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Cilacap 2014-2016, pembahasan per sektor ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016, sektor basis dan potensial sebagai prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Cilacap, dan rekomendasi arah strategi pembangunan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran bagi peneliti berikutnya.

Kemudian pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Pembangunan Ekonomi**

##### **1. Definisi Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai sifat berikut:

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu.
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Peningkatan pendapatan perkapita itu harus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi (baik legal formal maupun informal).<sup>26</sup>

Menurut Todaro tujuan dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan

---

<sup>26</sup> Lioncin Arsyad, *Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi*, hlm. 1.22.

tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai pemerataan yang sebaik mungkin.

Pembangunan ekonomi (*economic development*) berbeda dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Dalam pembangunan ekonomi terkandung arti adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat atau GDP dimana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*), sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai GDP (*Gross domestic Product*) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan mungkin saja pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan atau sebaliknya.<sup>27</sup>

## 2. Paradigma Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di Negara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (*world view*). Diantara paradigma pembangunan di Negara-negara berkembang tersebut adalah:<sup>28</sup>

### a. Paradigma dengan Kebutuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)

Pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya adalah orientasi dari paradigma ini. Dengan memanfaatkan investasi dan teknologi, paradigma ini berharap dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ukuran untuk merencanakan atau menghitung

---

<sup>27</sup> Suryana, *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 5.

<sup>28</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, sebuah studi komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 39-48.

pertumbuhan adalah produk nasional bruto (*Gross National Product / GNP*). Sedangkan asumsi yang dipakai adalah tetesan ke bawah (*trickle down effect*), yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pemerataan.

Pada perkembangannya, konsep tetesan ke bawah yang diharapkan oleh Negara-negara yang menggunakan paradigma ini tidak terjadi. Paradigma ini justru meningkatkan ketimpangan (*inequality*) yang makin mendalam antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Dengan kata lain, paradigma ini dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi tetapi gagal dalam pemerataan. Padahal yang diharapkan tidak sekedar memaksimalkan produktivitas, tetapi juga mengatasi masalah ketimpangan antar kelompok.

b. Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)

Paradigm ini muncul untuk merespon kegagalan paradigma yang pertama dengan memasukkan unsur pemerataan di dalamnya agar tidak terjadi kesenjangan antar golongan kaya dan miskin. Dengan memanfaatkan investasi, teknologi, dan pengukuran yang sama, paradigma ini juga telah dilaksanakan oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada masa orde baru, paradigma ini dikenal dengan delapan jalur pemerataan.

Pada pelaksanaannya, paradigma ini juga tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di Negara-negara berkembang. Hal ini diduga diakibatkan oleh pendekatan makro dan ketidaksiapan sumber daya manusianya yang tidak sungguh-sungguh berorientasi pada kelompok sasaran (penduduk miskin). Budaya korupsi menjadi salah satu faktor dominan penyebab bocornya anggaran pembangunan yang diperuntukkan rakyat kecil atau miskin. Di sisi lain masyarakat miskin juga belum siap memperbaiki sikap mentalnya, sehingga berapapun modal yang diberikan, akan habis dan tidak merubah nasib mereka. Oleh karenanya pendekatan makro yang

bertujuan memperbaiki ekonomi rakyat kecil tanpa mempersiapkan SDMnya, maka akan menemui kegagalan juga.

c. Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)

Paradigma dengan kebutuhan pokok sebagai pendekatannya merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kelompok sosial. Paradigma ini berharap bahwa semua kelompok target dapat terpenuhi kebutuhannya, seperti pangan, papan (rumah), pendidikan, dan kesehatan. Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dapat mengatasi kebutuhan masyarakat dengan baik.

Saat anggaran terbatas, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya masyarakat kembali tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Akhirnya paradigma ini gagal sebagaimana paradigma sebelumnya. Hal ini terjadi karena penduduk miskin tidak bisa merubah nasibnya kecuali dengan mengharap bantuan dari pemerintah.

d. Paradigma dengan Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigm*)

Belajar dari paradigma pembangunan yang mengalami kegagalan sebelumnya, para ahli ekonomi pembangunan, ahli kependudukan, dan ahli sumberdaya manusia merumuskan pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Paradigma ini menganggap bahwa pembangunan harus berorientasi pada manusia sebagai obyek dan subyek sekaligus. Paradigma ini menghilangkan dikotomi antara manusia sebagai pelaksana pembangunan dan manusia sebagai target yang harus ditingkatkan kesejahteraannya.

Paradigma ini membangun manusia secara utuh dan totalitas. Hal ini disebabkan sumber daya manusianya dibangun sesuai dengan kebutuhan fisik (materi) dan kebutuhan psikis (sikap mental). Oleh karenanya SDM menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Mulai

dari perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi hasil pembangunan, yakni: jumlah penduduk, pendapatan dan distribusinya, tingkat pendidikan, mobilitas, dan kesempatan kerja serta kesehatan melibatkan sumber daya manusia.

e. Paradigma Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development Paradigm*)

Paradigma ini muncul pada tahun 1970 ketika *Club of Rome* mengangkat studi tentang keterbatasan pertumbuhan (*the limit of growth*). Studi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan yang diharapkan dalam pembangunan selama ini akan berakhir kurang dari 100 tahun. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang ada akan terkuras habis.

Pemecahan di atas persoalan ini memperkuat argumen politik di atas. Karena jelas bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang bebas-sepanjang dibenarkan berkembang menurut garis-garis kapitalisme tradisional akan segera menuju kepada kebuntuan ekologi. Karena itu perkembangan Negara-negara terbelakang sekali momentum pertama telah dicapai, harus menemukan cara untuk penghematan bahan dan produksi sampai pada tingkat yang belum dikenal di Barat sekarang. Pemborosan-pemborosan sumber-sumber seperti pemakaian mesin cuci, televisi, dan alat-alat rumah tangga yang meniru gaya penghidupan Barat tidak mungkin ditiru oleh seluruh dunia.<sup>29</sup>

Gagasan yang ada dalam paradigma ini belum terbukti, tetapi menyadarkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Jika umat manusia menginginkan hidup sejahtera, maka harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini berharap masa depan bumi tidak akan terguncang hanya karena kesewenangan manusia dalam mendapatkan fasilitas yang terkandung di dalamnya. Jika efisiensi merupakan konsep ekonomi dan keadilan ekonomi merupakan konsep ekonomi yang didasarkan

---

<sup>29</sup> Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, terj. Sutan Dianjung (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 308.

pada etika, maka konsep berkelanjutan (*sustainable*) adalah gabungan antara faktor-faktor ekonomi, fisik, sosial, dan politik. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberi manfaat pada semua (warga masyarakat) termasuk generasi mendatang secara adil dan merata.<sup>30</sup>

f. Paradigma dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (*General Public Participation Paradigm*)

Paradigma ini muncul dalam kritik terhadap pembangunan yang direncanakan secara terpusat (*central planning*). Paradigma ini berharap bahwa seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Partisipasi yang besar dalam pembangunan dapat diperankan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi politik, partisipasi ekonomi, pendidikan, hukum, dan sosial.

Tanpa adanya keterbukaan terhadap kritik, sebenarnya pembangunan sedang berjalan menuju pada proses pembusukan yang semakin dalam. Satu-satunya jalan untuk mempertahankannya adalah dengan memberikan kesempatan bagi setiap kepentingan dari semua golongan untuk mendapatkan pemenuhannya. Untuk itu, menguatnya kesadaran politik masyarakat luas yang muncul dalam kritik-kritik terhadap ideologi pembangunan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam membuat desain pembangunan di masa datang. Menguatnya isu pemberdayaan (*empowerment*) dalam pembangunan semakin terasa desaknya, sehingga tanpa adanya perhatian terhadap kenyataan ini, keberlangsungan (*sustainable*) pembangunan justru sedang berada pada posisi terancam.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hlm. 217.

<sup>31</sup> A. Prasetyantoko, *Arsitektur Baru Ekonomi Global, Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2001), hlm. 111.

g. Paradigma Pembangunan Mandiri (*Self Reliant Paradigm*)

Paradigma ini berangkat dari upaya untuk menghilangkan ketergantungan dalam melaksanakan pembangunan (dependensi). Paradigma ini mengembangkan teknologi sendiri tanpa mengambil (impor) dari luar. Negara-negara yang menggunakan paradigma ini adalah India pada masa Mahatma Gandhi, Cina pada masa Maozedong, Tanzania pada masa Julius Nyerere, dan Indonesia pada masa Bung Karno yang terkenal dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Namun pada kenyataannya paradigma ini juga gagal dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan paradigma ini juga tidak sesuai dengan kondisi yang melilit Negara berkembang itu sendiri.

h. Paradigma Syariah (*Syariah Paradigm*)

Paradigma ini muncul seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran syari'ah dalam perekonomian. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum Tuhan. Selama ini, banyak negara di dunia termasuk para pengambil kebijakan di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam yang menjadikan indikator materiil sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Padahal kemajuan dari sisi materiil belum menjamin kesejahteraan yang hakiki. Aspek moralitas dan akhlak terabaikan, padahal moralitas dan akhlak yang baik sangat menentukan kualitas pembangunan ekonomi itu sendiri. Akibatnya fakta menunjukkan bahwa ditengah kemajuan peradaban materiil saat ini, banyak manusia yang kehilangan nilai dan hakikat kemanusiaannya itu sendiri. Manusia menjadi semakin individualis dan egois serta melupakan nilai-nilai kepedulian dan sosial kemasyarakatan.

Karena itu, dalam konsep ekonomi pembangunan syariah, keseimbangan antara aspek materiil dengan moral merupakan sebuah



keniscayaan. Keseimbangan ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, dan dapat menghantarkan manusia kembali pada hakikat kemanusiaannya yang sesuai dengan sunatullah kehidupan.<sup>32</sup>

## B. Landasan Teologis Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya (*falah*). Pembangunan tidak boleh hanya terkait dengan *masalah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan lebih abadi (*transendental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rosul, *ijma*, *qiyas*, maupun *ijtihad* para ulama faqih.

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.<sup>33</sup>

Istilah pembangunan dalam khasanah Islam dan dalam karya-karya klasik lazimnya dihubungkan dengan konsep *'imarah al-ard* (memakmurkan bumi) yang dipahami dari ayat Al-Quran salah satunya surat Hud ayat 61.<sup>34</sup>

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ



<sup>32</sup>Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm. 16.

<sup>33</sup>Agung Eko Purnawa, *Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 18.

<sup>34</sup>Asmuni Mth, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, hlm. 128-129.

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Mayoritas penulis berpendapat bahwa kata *al-‘imarah* (memakmurkan atau mengelola bumi untuk hidup manusia) identik dengan kata *at-tanmiyah al-iqtisadiyah* (pembangunan ekonomi).<sup>35</sup>

Cara pandang sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu sistem yang diterapkan, maka Islam harus memiliki pandangan dunia yang holistik mencakup unsur kemanusiaan dan ketuhanan. Menurut Umer Chapra prinsip utama dalam ekonomi pembangunan Islam adalah tauhid, khilafah, dan ‘adalah. Sementara menurut Khurshid Ahmad prinsip utama atau landasan filosofi ekonomi pembangunan Islam ada empat (4) yaitu; tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah.

Dari kajian para ulama dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi Islam, yaitu *tauhid*, *khalifah*, keadilan, dan *tazkiyah*.<sup>36</sup>

#### 1. *Tauhid*

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan ekonomi yang dilakukan harus diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya.

#### 2. *Khalifah*

Adapun dasar filosofis ekonomi Islam menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam konteks individu maupun anggota masyarakat adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Inilah kelebihan konsep pembangunan Islam dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan

<sup>35</sup>Asmuni Mth, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, hlm. 131.

<sup>36</sup>Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 180.

bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya. Oleh karena itu, pembangunan SDM ini perlu mendapat perhatian, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

### 3. Keadilan

Keadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata, dimana konsep persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jika dibarengi dengan konsep keadilan. Ibnu Taimiyah juga menegaskan akan pentingnya keadilan. “Tuhan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, tepi tidak menegakkan negeri yang tidak adil meskipun beriman. Sementara untuk mewujudkan keadilan tersebut setidaknya harus dilakukan dengan cara; (1) pemenuhan kebutuhan, (2) penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, (4) pertumbuhan dan stabilitas.<sup>37</sup>

### 4. *Tazkiyah*

Tugas yang diemban para rasul Allah adalah melakukan *tazkiyah* (penyucian) manusia dalam segala hubungan dengan Allah (*hablun minallah*), dengan manusia sesamanya (*hablun min an nas*), dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta negerinya.

Ajaran Islam adalah ajaran yang berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Terkait peran pemerintah atau negara, maka basis dari peran dan fungsi negara dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Titik berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi. Hal ini sebagaimana telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khatab ra. Beliau mengatakan: “kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap kuat, maka di mataku mereka sesungguhnya sangat lemah. Sebaliknya kelompok masyarakat yang di mata kalian dianggap lemah (*hina*), maka di mataku sesungguhnya sangat

---

<sup>37</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (surabaya: Risalah Gusti, 1999). hlm. 229-230.

*kuat.*” Artinya, orientasi Khalifah Umar adalah pada kelompok yang paling tidak berdaya. Seluruh konsentrasi kekuasaan Khalifah Umar diarahkan untuk membela kepentingan mereka.

Logika Khalifah Umar sangat sederhana, jika kelompok lemah terbela dan terberdayakan dengan baik, maka kelompok elite masyarakat pasti akan menikmati pula kemajuan ekonomi yang ada. Semua akan terangkat nasibnya. Namun basis kebijakan itu adalah bagaimana “melayani kepentingan” kelompok elite masyarakat, maka belum tentu kelompok lemah (dhuafa) akan dapat menikmati kue pembangunan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, menurut pakar ekonomi syariah Prof Ataul Huq Pramanik (1993), peran negara atau pemerintah dalam perekonomian itu ada 3 (tiga), yaitu:<sup>38</sup>

1. *Ideological role* (peran ideologis);
2. *Developmental role* (peran pembangunan); dan
3. *Welfare role* (peran kesejahteraan)

Adapun fungsi negara/pemerintah dalam perspektif Islam, paling tidak ada 3 (tiga) yaitu:

1. Fungsi alokasi
2. Fungsi distribusi
3. Fungsi stabilisasi dan perlindungan

Tabel 4. Tiga Fungsi Negara/Pemerintah<sup>39</sup>

Fungsi Alokasi	Fungsi Distribusi	Fungsi stabilisasi dan Perlindungan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan APBN</li> <li>• <i>G to P (Government to people) transfer</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin pendapatan dan kekayaan dinikmati seluruh lapisan masyarakat</li> <li>• <i>P to P (Poeples to poeple) transfer</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan stabilitas ekonomi</li> <li>• Menjamin ancaman dari ancaman</li> </ul>

<sup>38</sup>Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm. 108-109.

<sup>39</sup>Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm. 110.

Dalam peranan Negara mengenai perencanaan ekonomi, tentu Negara memainkan peranan pokok dalam proses pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi yang terpusat pada suatu perencanaan. Menurut Ishak, peranan Negara penting sekali, akan tetapi tidak sampai menggantikan posisi individu dalam urusan kehidupan umum, bahkan Negara bekerja untuk menolong anggota masyarakat dalam menunaikan kewajiban mereka.<sup>40</sup>

Disisi lain, Islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan jumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.<sup>41</sup> Ini artinya kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan harus terpenuhi dengan jumlah komoditas yang diperlukan. Hal ini menggambarkan bahwa setiap sektor perekonomian harus saling terkait baik sektor yang menjadi sektor dominan maupun sektor penunjangnya demi pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan yang berimbang atau ketidaksamaan ekonomi pada batas yang wajar.

### **C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

#### **1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dan dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendekatan yang disajikan atas harga berlaku dan harga konstan (rill).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas

---

<sup>40</sup> Asmuni Mth, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, hlm. 144.

<sup>41</sup> Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 125.

dasar harga konstan (rill) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.<sup>42</sup>

## 2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- a) PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu sebaliknya.
- b) PDRB harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
- c) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
- e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu Negara.

Dalam penelitian ini, PDRB dihitung berdasarkan harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi rill bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

## 3. Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha dalam penelitian ini berdasarkan pada PDRB tahun dasar 2010, yang meliputi 17 sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan usaha Kab. Cilacap 2012-2016*, hlm. 1.

Tabel 5. Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2010

PDB Tahun Dasar 2010	
Kategori	Lapangan Usaha
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
B.	Pertambangan dan Penggalian
C.	Industri Pengolahan
D.	Pengadaan Listrik dan Gas
E.	Pengadaan Air
F.	Konstruksi
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparas Mobil dan sepeda Motor
H.	Transportasi dan Pergudangan
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J.	Informasi Komunikasi
K.	Jasa Keuangan
L.	Real Estate
M,N.	Jasa Perusahaan
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P.	Jasa Pendidikan
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
RSTU	Jasa Lainnya

Sumber: BPS Cilacap (data diolah)

Melihat PDRB sektoral ini adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah dikelompokkan atas sektor-sektor. Hal ini seperti pengelompokan sektor seperti di atas dimana nantinya setiap sektor dapat dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut.<sup>43</sup>

Dalam pendekatan Sektoral, untuk setiap sektor/komoditi semestinya dibuat analisis, sehingga dapat memberikan jawaban tentang sektor apa yang memiliki *competitive advantage* di wilayah tersebut yang dapat bersaing di pasar global, sektor apa yang basis dan non basis, sektor apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi, dan sektor apa yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut. Atas dasar ini, dapat ditetapkan skala prioritas tentang sektor/komoditi apa yang perlu dikembangkan di wilayah tersebut berdasarkan sasaran yang ingin

<sup>43</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT. bumi Aksara, 2012). Hlm. 36.

dicapai. Penetapan skala prioritas sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah.<sup>44</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Lapangan Usaha

Uraian lapangan usaha yang disajikan mencakup ruang lingkup dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha.

##### a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Terdiri atas:

##### 1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

##### 2) Kehutanan dan Penebangan Kayu

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicapuk juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, termasuk

---

<sup>44</sup>Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, hlm. 37.



kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

### 3) Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicapuk juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

#### b. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

#### c. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru

dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. Kategori ini terdiri atas:

- 1) Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi
- 2) Industri Makanan dan Minuman
- 3) Industri Pengolahan Tembakau
- 4) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
- 5) Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
- 6) Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman
- 7) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam
- 8) Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
- 9) Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
- 10) Industri Barang Galian Bukan Logam
- 11) Industri Logam Dasar
- 12) Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik
- 13) Industri Mesin dan Perlengkapan
- 14) Industri Alat Angkutan
- 15) Industri Furnitur
- 16) Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas

serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC. Kategori ini terdiri atas: Ketenagalistrikan; dan Pengadaan Gas dan Produksi Es

e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

f. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan

sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya; Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, bulldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan

kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perumahan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi. Kategori ini terdiri atas: Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

#### h. IAIN PURWOKERTO Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik

bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Kategori ini terdiri atas: Penyediaan Akomodasi; dan Penyediaan Makan dan Minum.

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemrograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini terdiri atas: jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

l. Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah properti berupa tanah dan bangunan.

m. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

n. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti

halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini, meskipun dilakukan oleh badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

o. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah



Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; dan Jasa Kegiatan Sosial.

q. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer, Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga (yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan); Jasa Swasta Lainnya termasuk kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan Perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

#### **D. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)**

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.<sup>45</sup> Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Dalam membahas teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-

---

<sup>45</sup>Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, hlm. 116.

batas perekonomian wilayah tersebut. Implikasi dari pembagian kegiatan seperti ini adalah adanya hubungan sebab akibat yang membentuk suatu teori basis ekonomi. Teori ini dapat memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal. Di samping itu, teori ini juga dapat digunakan sebagai indikasi dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi kegiatan perekonomian suatu wilayah.<sup>46</sup>

Menurut Budi Harsono (2001) ada beberapa metode untuk mengidentifikasi antar kegiatan basis dan non basis, yaitu:

1. Metode pengukuran langsung

Metode ini bisa dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha kemana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Akan tetapi metode ini menguras biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat kelemahan tersebut, maka sebagian besar para ekonom wilayah menggunakan pengukuran tidak langsung.

2. Metode pengukuran tidak langsung

- a. Metode melalui pendekatan asumsi, biasanya berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan basis dan non basis.

- b. Metode *Location Quotient* dimana membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah tertentu dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di Wilayah atasnya. Asumsi yang digunakan adalah produktivitas/konsumsi rata-rata antar wilayah yang sama. Metode ini memiliki beberapa kebaikan diantaranya adalah metode ini memperhitungkan penjualan barang-barang antara, tidak mahal biayanya dan mudah diterapkan.

---

<sup>46</sup>M. Urbanus Ambardi dan Socia Prihawantoro, *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: P2KTPW-BPPT, 2002), hlm.

- c. Metode campuran merupakan penggabungan antara metode asumsi dengan metode *Location Quotient*.
- d. Metode kebutuhan minimum dimana melibatkan sejumlah wilayah yang sama dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga regional dan bukan distribusi rata-rata.

Pengertian basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah: (1) perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) kehabisan cadangan sumber daya.

Semakin banyak sektor basis di suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya serta menimbulkan volume sektor non basis. Dengan kata lain sektor basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar, sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis terlebih dahulu. (Glasson, 1977).

## **E. Kebijakan dan Strategi Pembangunan**

### **1. Peranan Pemerintah**

Peranan pemerintah dalam hal campur tangannya terhadap proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing Negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan atau hampir semua orang setuju bahwa peranan pemerintah di Negara yang belum maju itu harus lebih aktif demi memperlancar pembangunan. Hal ini disebabkan situasi di negara tersebut dewasa ini berbeda dengan situasi ketika

Negara-negara yang sekarang telah maju mengalami proses perkembangan. Halangan untuk berkembang di Negara sedang berkembang saat ini lebih berat daripada halangan untuk berkembang di Negara-negara maju pada saat mereka mulai berkembang. Perkembangan ekonomi dewasa ini tidak bersifat spontan seperti perkembangan dalam abad 19. Oleh karena itu pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan.

Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah; menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan Negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum).<sup>47</sup>

## 2. Strategi Pembangunan

Memang secara umum hal-hal tersebut di atas ini dapat disetujui, tetapi biasanya setelah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat. Misalnya sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, tetapi adapula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral. Namun pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu: aliran pertama disebut sebagai “*all or nothing approach*” (semua atau tidak sama sekali) yang mengatakan bahwa rintangan-rintangan dari perkembangan itu hanya dapat di atasi bila pemerintah mengadakan industrialisasi besar-besaran dan secara cepat dan “*gradual approach*” yang mengatakan bahwa rintangan pertumbuhan sebaiknya dihilangkan secara bertahap.

Jadi menurut “*all or nothing approach*” pemerintah harus mengadakan rencana-rencana serta program-program, dan selekasnya dapat diadakan akumulasi kapital. Perencanaan itu paling sedikit harus mempunyai 4 kelompok target/sasaran yaitu: a) target produksi yang tegas

---

<sup>47</sup> Irawan dan M. Suparmoko. *Ekonomika Pembangunan*. (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), hlm. 403-404.

yang menunjukkan kenaikan produksi barang-barang yang diperlukan; b) perhitungan anggaran penanaman modal (investasi) untuk proyek investasi publik seperti jalan-jalan, jembatan, listrik, air dan sebagainya; c) membuat anggaran untuk “*human investment*” yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bidang pendidikan dan membuat peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perseorangan swasta, perusahaan-perusahaan besar dan lembaga-lembaga yang membantu pelaksanaannya.

Aliran kedua “*gradual approach*” mengatakan bahwa pembangunan lebih baik dengan pendekatan secara perlahan-lahan. Aliran ini menghendaki perencanaan yang sedikit saja, industrialisasi dilaksanakan secara perlahan dan mementingkan mekanisme pasar demi berkembangnya usaha-usaha swasta serta memecahkan masalah pembangunan itu bertahap.

Kebanyakan program pembangunan sekarang ini menitik beratkan pada perbaikan-perbaikan pertanian, promosi jasa-jasa sosial, perluasan prasarana dan pendirian industri-industri kecil. Alasan mengapa titik berat usaha atau program pembangunan pada sektor-sektor tersebut ialah bahwa sektor pertanian dan industri kecil merupakan sektor utama dan sektor yang paling banyak mengalami kemiskinan.

Mengenai “*social overhead capital*” memang harus diusahakan oleh pemerintah karena sektor swasta tidak tertarik, sedangkan sektor ini sangat perlu untuk menghindari terjadinya hambatan dalam pembangunan. Jasa-jasa sosial seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya yang dapat mengurangi penderitaan penduduk, hendaknya diusahakan oleh pemerintah pula. Sedangkan industri kecil karena tidak membutuhkan banyak kapital besar dan relatif membutuhkan sedikit pengetahuan dapat diserahkan kepada pihak swasta. Kebijakan ini cocok di Negara yang belum maju, karena kurangnya wiraswasta, dan pula kurangnya pasar yang mampu menyerap produksi jika terjadi secara besar-besaran. Dengan kata lain rencana pembangunan di Negara sedang berkembang hendaknya lebih

menitikberatkan pada pertanian, transportasi, tenaga listrik dan jasa-jasa sosial untuk pabrik-pabrik.<sup>48</sup>

Melihat dari kedua aliran strategi pembangunan di atas peranan Pemerintah sangat berpengaruh terhadap pembangunan, sebab Pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Oleh karena itu strategi pembangunan yang dirumuskan harus benar-benar bersifat inklusif tidak bersifat eksklusif yang hanya mementingkan golongan subsektor industri besar saja yang diprioritaskan, namun dengan melupakan sektor primer dan sektor potensial lain yang mempunyai keunggulan komparatif dan potensi yang menyerap banyak tenaga kerja.

### 3. Strategi Industrialisasi

#### a. Industrialisasi Berbasis Pertanian

Tidak dapat diingkari bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia selama periode 1997-1999, salah satu penyebab adalah karena kesalahan strategi industrialisasi selama pemerintahan orde baru yang tidak berbasis pada sektor yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar, yaitu pertanian. Selama krisis terbukti bahwa sektor pertanian masih mampu memiliki laju pertumbuhan yang positif, walaupun dalam persentase yang kecil. Sedangkan industri manufaktur (industri pengolahan) mengalami laju pertumbuhan yang negatif di atas satu digit.

Menurut Simatupang dan Syafaat (2000) Pengalaman di banyak NIM, seperti Negara-negara di Eropa, AS, dan Jepang, menunjukkan bahwa mereka memulai industrialisasi setelah atau bersamaan dengan pembangunan di sektor pertanian. Sebagai contoh, Inggris mengalami revolusi industri pada abad ke 18 setelah diawali dengan revolusi pertanian yang terjadi melalui introduksi teknologi *turnip*. Industrialisasi di Jepang berlangsung waktu itu bersamaan dengan revolusi pertanian yang terjadi melalui reformasi pertanian agraria (restorasi Meiji). Demikian juga pengalaman Taiwan pada

---

<sup>48</sup>Irawan, dan M. Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, hlm. 404-406.

dekade 1950-an yang menunjukkan bahwa industrialisasi berbasis pertanian melalui pengembangan industri berskala kecil dan berlokasi di pedesaan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan merata serta struktur ekonomi yang tangguh.

Ada beberapa alasan kenapa pembangunan sektor pertanian yang kuat esensial dalam proses industrialisasi di Negara seperti Indonesia, yakni sebagai berikut.

- 1) Sektor pertanian yang kuat, berarti ketahanan pangan terjamin. Hal ini merupakan salah satu prasyarat penting agar proses industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya bisa berlangsung dengan baik. Ketahanan pangan berarti tidak ada kelaparan dan ini menjamin kestabilan sosial dan politik, yang selanjutnya menjamin proses pembangunan ekonomi atau industrialisasi dapat berlangsung tanpa gangguan-gangguan.
- 2) Dari sisi permintaan agregat, pembangunan sektor pertanian yang kuat membuat tingkat pendapatan riil perkapita di sektor tersebut tinggi. Hal ini merupakan salah satu sumber permintaan terhadap barang-barang non makanan, khususnya manufaktur (keterkaitan konsumsi atau pendapatan). Di Indonesia, dimana sebagian besar penduduk di pedesaan dan memiliki sumber pendapatan langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pertanian, jelas sektor ini merupakan motor utama penggerak industrialisasi, terutama di pedesaan. Selain lewat keterkaitan konsumsi dan pendapatan, sektor pertanian juga berfungsi sebagai sumber pertumbuhan di sektor industri manufaktur lewat *intermediate demand effect* atau keterkaitan produksi: *output* dari industri menjadi *input* bagi pertanian.
- 3) Dari sisi penawaran, sektor pertanian merupakan salah satu sumber input bagi sektor industri manufaktur yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Dalam kata lain lewat keterkaitan produksi, pertumbuhan produktivitas atau *output* di

sektor pertanian bisa menjadi sumber pertumbuhan *output* di sektor industri manufaktur. Selain itu, pembangunan yang baik di sektor pertanian bisa menghasilkan *money surplus* di sektor tersebut, dan ini bisa menjadi sumber investasi di sektor industri manufaktur, khususnya industri skala kecil di pedesaan. Dengan kata lain, dari sisi penawaran agregat, selain lewat keterkaitan produksi, pertumbuhan *output* di sektor pertanian juga bisa menjadi sumber pertumbuhan *output* di sektor industri manufaktur lewat keterkaitan investasi.

Sudah cukup banyak pembahasan teoritis mengenai keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri dan studi-studi kasus di banyak NSB di Afrika, Asia, dan Amerika Latin membuktikan betapa pentingnya sektor pertanian bagi perkembangan dan pertumbuhan *output* di sektor industri. Keterkaitan antara dua sektor tersebut terutama didominasi oleh efek keterkaitan pendapatan, disusul kemudian oleh efek keterkaitan produksi, dan sedikit *evidens* mengenai keterkaitan investasi.<sup>49</sup>

b. Alternatif Strategi Industrialisasi

Selain meningkatkan kerja, ada tiga tujuan penting lainnya dari industrialisasi yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menciptakan atau meningkatkan nilai tambah ekonomi, yakni nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada, termasuk industri, pertanian, dan pertambangan.
- 2) Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- 3) Mengurangi ketergantungan pada impor.

Dalam memilih alternatif strategi industrialisasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Tulus T. H. Tambunan. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 121-122.



- 1) Melihat kenyataan bahwa ada dua sektor ekonomi yang besar dimana Indonesia memiliki keunggulan komparatif atas sektor-sektor tersebut, yaitu pertanian dan pertambangan, maka dalam proses industrialisasi harus dibangun/dikembangkan keterkaitan produksi ke depan dan ke belakang antara kedua sektor primer tersebut dengan sektor industri manufaktur. Industrialisasi atau pembangunan sektor industri manufaktur di Indonesia harus dilandaskan pada sektor pertanian dan sektor pertambangan yang kuat, sesuai paradigma mengenai spesialisasi yang didasarkan pada keunggulan komparatif yang ada dan keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan. Oleh sebab itu, dalam proses industrialisasi, perlu diberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kinerja kedua sektor primer tersebut, dalam arti peningkatan efisiensi, produktivitas, dan tingkat daya saing globalnya. Artinya dalam proses industrialisasi sektor pertanian atau pertambangan tidak boleh “dilupakan” seperti yang terjadi selama pemerintah orde baru di Indonesia (khususnya pertanian).
- 2) Selain dengan dua sektor primer, juga harus dibangun/dikembangkan keterkaitan produksi antara sektor industri manufaktur dengan sektor-sektor sekunder lainnya dan sektor-sektor tersier. Di samping itu, juga harus dibangun/dikembangkan keterkaitan produksi di dalam sektor industri manufaktur antar sub sektor/kelompok industri dan antar unit produksi dari skala yang berbeda di dalam setiap kelompok industri, misalnya *subcontracting* antara industri kecil dengan industri skala menengah dan atau industri skala besar. Dengan keterkaitan produksi yang kuat antar unit produksi, baik di dalam subsektor yang sama maupun antar sub sektor yang berbeda, akan tercapai skala ekonomis yang lebih efisien di sektor industri manufaktur di satu pihak, dan mengurangi ketergantungan sektor tersebut terhadap impor di pihak lain. Untuk mendukung pengembangan

keterkaitan produksi di dalam negeri, diperlukan kebijakan-kebijakan pendukung dalam bidang fiskal, moneter, perdagangan luar negeri, perburuhan investasi, teknologi, dan pendidikan. Kerjasama yang baik antar departemen/kementerian sangat diperlukan. Kalau tidak, suatu kebijakan industri yang baik bisa tidak berdampak apa-apa karena adanya distorsi di pasar *output* atau pasar *input* akibat kebijakan fiskal dan moneter yang salah.

- 3) Strategi yang tepat bagi Indonesia adalah yang memfokuskan pada perkembangan kelompok-kelompok industri berikut ini:
  - a) Industri-industri yang memakai komoditas-komoditas pertanian dan pertambangan sebagai bahan baku utama. Strategi ini akan menghasilkan *downstream industries* di dalam negeri yang berdaya saing tinggi.
  - b) Industri-industri mesin, alat-alat produksi, komponen, *sparepart*, dan material-material lain. Strategi ini akan menghasilkan *supporting industries* atau *meadstream industries* yang berarti akan mengurangi ketergantungan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri terhadap impor. Ini yang dimaksud dengan pendalaman basis industri.
  - c) Industri-industri yang *outward looking-oriented*. Ini tidak harus berarti bahwa yang dibangun hanya industri-industri yang menghasilkan barang-barang untuk tujuan ekspor, tetapi juga industri-industri yang membuat barang-barang untuk kebutuhan pasar domestik dengan daya saing global yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan barang impor dalam sistem mekanisme pasar bebas. Dalam strategi pengembangan/pembangunan industri yang berorientasi ekspor, hal pertama yang perlu dikembangkan adalah industri-industri yang padat karya. Setelah Indonesia siap, terutama dalam hal SDM, teknologi, dan prasarana serta sarana penunjang, barulah dikembangkan industri-industri yang membuat produk-produk

ekspor yang padat modal, teknologi, dan *knowledge*. Akan tetapi, tidak harus berarti bahwa Indonesia harus mengembangkan industri-industri berteknologi tinggi, melainkan yang harus dikembangkan adalah industri-industri yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif; dan ini tidak harus selalu berarti industri-industri yang padat modal atau teknologi canggih.

- 4) Pengembangan sektor industri manufaktur harus berdasarkan spesialisasi berdasarkan faktor-faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan faktor-faktor keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan; tidak lagi industrialisasi berspektrum luas (*broad based industry*) seperti pada zaman orde baru.
- 5) Industrialisasi harus berdampak positif terhadap saldo neraca perdagangan, tidak hanya dengan cara meningkatkan ekspor barang-barang dengan nilai tambah tinggi (manufaktur), tetapi juga dengan cara mengurangi impor. Pembangunan industri-industri sesuai dengan butir 3b dan 3c di atas akan meningkatkan ekspor dan sekaligus mengurangi impor.
- 6) Industrialisasi harus mendukung potensi daerah, sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Industrialisasi tidak boleh lagi terpusatkan hanya di Jawa (kota), tetapi harus menyebar ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Akan tetapi, penyebaran tersebut harus tetap memegang pada prinsip "*optimal location*": penempatan suatu industri di suatu lokasi yang strategis dengan total biaya paling minimum, yang mencakup biaya-biaya transportasi, informasi, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan lain-lain.
- 7) Strategi industrialisasi yang tepat adalah yang bisa meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan lokal/nasional dalam memproduksi, mengembangkan teknologi dan produk dengan merek sendiri, serta membangun jaringan distribusi global sehingga dapat

mengurangi ketergantungan pembangunan industri nasional terhadap investasi asing.

- 8) Industrialisasi harus menciptakan atau mempercepat proses pendalaman struktur industri (diversifikasi). Hal ini hanya bisa dicapai dengan pembangunan berbagai macam industri (lihat butir 3a dan 3b di atas).
- 9) Pola industri juga harus berorientasi pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, tentu tanpa mengurangi tingkat efisiensi dan produktivitas. Artinya, perkembangan sektor industri manufaktur harus menciptakan kesempatan kerja, tetapi tidak semata-mata hanya berlandaskan pada prinsip *full employment*, melainkan *productive employment*, yakni menciptakan kesempatan tenaga kerja sebanyak mungkin, tetapi produktif. Ini tidak berarti semua industri harus padat karya, tetapi harus ada pemilihan industri-industri menurut intensitas pemakaian tenaga kerja dan modal. Ada jenis-jenis industri (atau bagian-bagian tertentu dalam suatu proses produksi) yang memang tidak bisa dilakukan dengan metode produksi yang padat karya, dan ini tidak harus berarti dampaknya sangat kecil terhadap kesempatan kerja. Melalui total keterkaitan produksi (keterkaitan langsung plus tidak langsung) ke depan dan ke belakang dari industri yang padat modal tersebut dengan industri-industri yang lain yang padat karya akan menciptakan *total employment effect* yang besar. Selain meningkatkan tenaga kerja, demi tujuan pemerataan, lokasi pembangunan industri juga harus diusahakan menyebar keseluruhan pelosok daerah. Yang dimaksud “diusahakan” adalah bahwa penentuan lokasi suatu industri tentu harus didasarkan pada prinsip *minimum location cost* (seperti yang telah dibahas sebelumnya).
- 10) Jenis-jenis insentif yang akan diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mendukung proses industrialisasi harus yang bisa dibuktikan memiliki *social cost effectiveness*-nya yang tinggi,

artinya *social benefit* lebih besar daripada *social cost*-nya. Selain itu, kebijakan ini harus transparan, bersifat sementara, dan dalam pelaksanaannya harus konsisten dengan ketetapan pemerintah yang ada.

Dari uraian di atas, jelas untuk dapat melaksanakan pola industrialisasi yang tepat di Indonesia dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama penyediaan SDM (termasuk wiraswasta, manajer, tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga terdidik, dan sebagainya) dengan kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang; teknologi yang tepat guna dan infrastruktur fisik dan non fisik (termasuk kelembagaan).

Strategi di atas sangat sesuai diterapkan di daerah Kabupaten Cilacap. Sebab, Kabupaten Cilacap juga memiliki perekonomian yang dualistik yakni industri manufaktur (pengolahan) dan pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dengan kekayaan alamnya yang di dalamnya masih terdapat ketimpangan produktivitas dan yang lainnya.

## **F. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

### **1. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>50</sup>

Berdasarkan perkembangannya, Adisasmita membedakan model pembangunan daerah menjadi empat model. Model pembangunan I yaitu model pembangunan yang berorientasi pada pengembangan PDRB. Model ini lebih menekankan pada aspek ekonomi, dengan modernisasi dan

---

<sup>50</sup> Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, hlm. 298.

industrialisasi yang kurang seimbang akan menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan. Model pembangunan II berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian, pengembangan sektor pertanian dan pedesaan. Model pembangunan III menekankan pada kegiatan aparatur pemerintah yang bertanggungjawab dan berupaya membangkitkan kesadaran serta kemampuan instansi secara individual dan kolektif. Model ini lebih berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. Model pembangunan IV menekankan pada penguatan daya saing ekonomi wilayah, hal ini didasari oleh perubahan ekonomi yaitu adanya globalisasi dan perdagangan bebas.<sup>51</sup>

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi pada daerah tersebut. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Prof. Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dilakukan.<sup>53</sup>

Mengenai konsep pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat beberapa model teori yang menjelaskan meski memiliki asumsi yang berbeda-beda, diantaranya:

---

<sup>51</sup> Adisasmita H. Raharjo, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 204.

<sup>52</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 423.

<sup>53</sup> ML. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 57.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini dipelopori oleh George H. Bort tahun 1960, menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah ditentukan oleh potensi daerah bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah

Dalam model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar. Apabila proses pembangunan terus berlanjut, dan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar.<sup>54</sup>

b. Teori Pertumbuhan *Regional Base*

Teori ini diperkenalkan oleh Douglas C. North tahun 1956, teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan. Teori base ekspor mengandalkan pada kekuatan permintaan eksternal (*outward looking*). Wilayah dengan tingkat permintaan tinggi akan menarik investasi dan tenaga kerja. Dan apabila suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan akan meningkat cepat.

Kegiatan ekspor akan mempengaruhi keterkaitan ekonomi ke belakang (kegiatan produksi) dan kedepan sektor pelayanan (*service*). Dengan kata lain kegiatan ekspor akan meningkatkan pendapatan

---

<sup>54</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Padang: Baduose Media, 2008), hlm. 95.

faktor-faktor produksi dan pendapatan wilayah. Syarat utama bagi pengembangan teori ini adalah sistem wilayah terbuka, ada aliran barang, modal, teknologi antar wilayah, dan kerjasama dengan Negara lain.<sup>55</sup>

c. Teori pertumbuhan *Cumulative Causation*

Teori ini merupakan kritik terhadap teori Neo-Klasik. Berdasarkan teori ini ketimpangan pembangunan wilayah dapat dikurangi melalui program pemerintah. Sedangkan bila ketimpangan wilayah diserahkan pada mekanisme pasar, justru ketimpangan akan meningkat seiring proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah akan mengalami peningkatan produktivitas apabila terdapat peningkatan terhadap kegiatan ekonomi pada daerah bersangkutan, demikian pula sebaliknya. Hubungan tersebut terbentuk karena dilandasi adanya keuntungan aglomerasi dan *Increasing Return to Scale* (kenaikan output) yang akan semakin besar bila terdapat peningkatan kegiatan produksi di daerah.

## G. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.<sup>56</sup>

Untuk mengetahui potensi ekonomi daerah, peneliti menggunakan alat analisis *Klassen Tipologi*, yakni metode analisis yang berfungsi untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi ini, dapat digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah pada masa

---

<sup>55</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, hlm.

<sup>56</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Publik*., hlm. 99.



mendatang. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam metode analisis ini, terdapat empat klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu: sektor tumbuh cepat (*rapid growth sector*), sektor tertekan (*retarded sector*), sektor sedang tumbuh (*growing sector*), dan sektor relatif tertinggal (*relatively backward sector*).<sup>57</sup>

Setelah identifikasi sektor-sektor ekonomi pada empat klasifikasi tersebut selesai, kebijakan pemerintah daerah harus mampu mengolah strategi untuk dapat mengembangkan sektor yang masuk dalam klasifikasi “sektor sedang tumbuh” menjadi “sektor tumbuh tapi tertekan”, sektor tertekan berkembang menjadi “sektor tumbuh cepat”. Dan pemerintah daerah harus mengetahui mengapa sektor tersebut berada dalam klasifikasi tersebut, apa dari faktor keterbatasan sumberdaya alam atau kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat sebagai aktor pembangunan.

## H. Kerangka Berfikir

Kabupaten Cilacap merupakan wilayah yang memiliki dualisme perekonomian. Dualisme tersebut merupakan konsekuensi keberadaan industri kilang Migas di Kabupaten Cilacap. Peranan sektor Migas di Kabupaten Cilacap sangat besar sehingga tampak adanya perbedaan produktivitas yang menonjol pada kinerja ekonomi daerah, khususnya antara PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa Migas. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada aspek pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral dan pendapatan perkapita.<sup>58</sup>

Dualisme ekonomi diperkuat dengan adanya kecenderungan sektoral dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul oleh

---

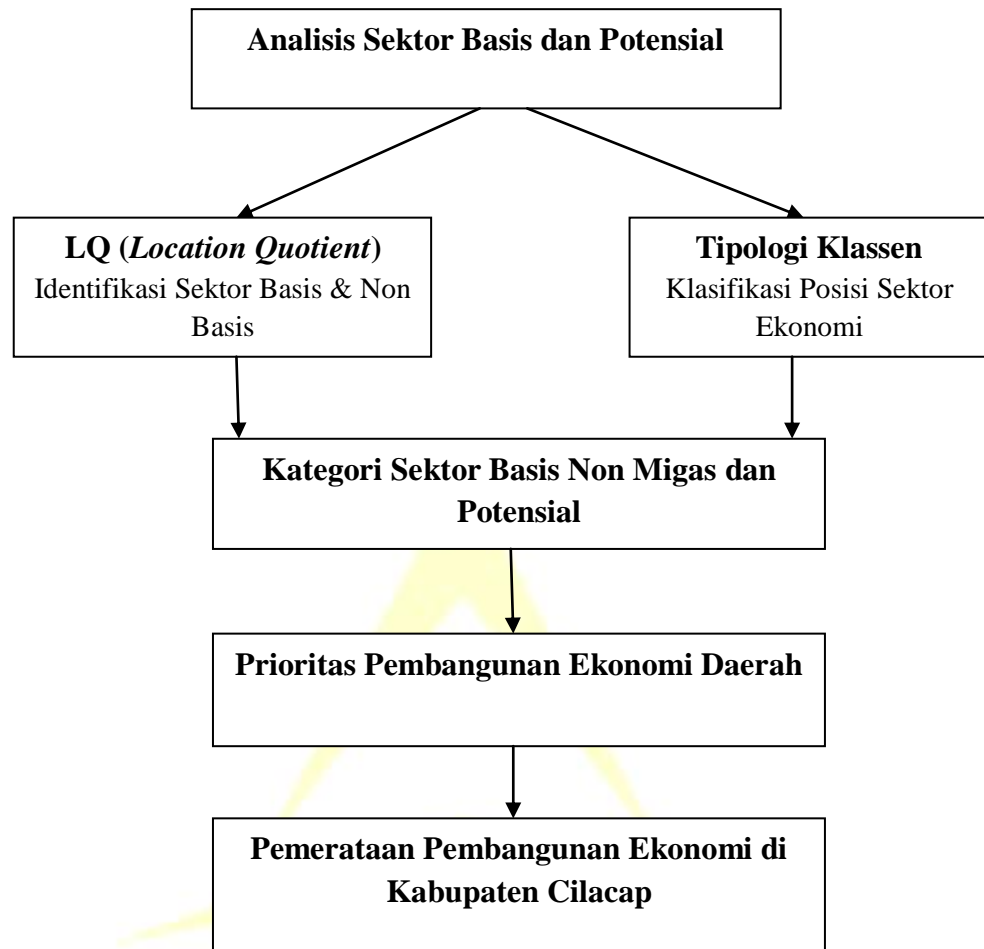
<sup>57</sup>Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, “Penentu sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir: *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*”, Vol. 10, nomor 1, 2015. Hlm 42.

<sup>58</sup>“*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap 2012-2017*”, hlm. IV-10.

sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Meski sektor-sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja, namun sektor Industri pengolahan (Migas) yang memiliki kontribusi paling besar dalam PDRB. Ketimpangan antar sektor juga berdampak pada ketimpangan wilayah, hal ini disebabkan karena sektor industri pengolahan (Migas dan industri besar) terkonsentrasi di kecamatan tertentu saja, sedang sektor yang lain tersebar di semua kecamatan. Dan itu menunjukkan bahwa perlunya pengembangan sektor basis non Migas, untuk meminimalisir ketimpangan antar sektor. Sebab dari pemerataan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, akan mengurangi tingkat kecenderungan tidak seimbang nya pendapatan riil perkapita dan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, dorongan dari sektor-sektor potensial non Migas yang masih belum maksimal atau belum dikembangkan lebih lanjut dalam pemanfaatannya oleh pemerintah daerah dan masyarakat, harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyusun kebijakan strategi pembangunan ekonomi daerah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata.



IAIN PURWOKERTO



Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian

IAIN PURWOKERTO

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>59</sup> Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>60</sup>

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor BPS Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 16A Cilacap, melalui penelitian sekunder yang telah dituliskan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan laporan statistik setiap kabupaten dan provinsi setiap tahun.

##### **B. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau pengukuran, untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan juga sistematis.<sup>61</sup>

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>62</sup> Dalam hal ini penulis mendeskripsikan tentang struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

<sup>60</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7.

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 12.

<sup>62</sup>Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 10

dengan menggunakan metode *Location Quotient* dan *Typology Klassen* yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

### C. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat, teori, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, dan sebagainya.<sup>63</sup>

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.

### D. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>64</sup> Dalam hal ini, populasi yang menjadi obyek penelitian adalah keseluruhan Produk Domestik Regional Bruto sektoral Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jateng yang dihitung berdasarkan harga konstan tahun 2014-2016 yang mana terdapat 17 sektor<sup>65</sup>:

- a) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Pengadaan Listrik dan Gas
- e) Pengadaan Air
- f) Konstruksi

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274

<sup>64</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 115.

<sup>65</sup>Badan Pusat Statistik

- g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- h) Transportasi dan Pergudangan
- i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j) Informasi dan Komunikasi
- k) Jasa Keuangan
- l) Real Estate
- m) Jasa Perusahaan
- n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o) Jasa Pendidikan
- p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q) dan Jasa Lainnya.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian sampel atau mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *sampling jenuh* yang merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.<sup>67</sup>

## E. Variabel Penelitian

Variabel adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>68</sup> Variabel dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>66</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 174.

<sup>67</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, dan Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 156.

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 118.

### 1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan.

### 2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur perekonomian suatu Negara di cerminkan oleh kontribusi sektoral di dalam pendapatan nasional.<sup>69</sup> Struktur ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang mencakup Sektor ekonomi (lapangan Usaha) yang terbagi menjadi beberapa sektor menurut PDRB tahun dasar 2010 (KBLI 2009) yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

### 3. Sektor Basis non Migas

Sektor Basis non Migas adalah sektor ekonomi (tanpa industri batu bara dan industri pengilangan Migas)<sup>70</sup> yang mampu melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang berkaitan.

### 4. Sektor Potensial

Sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam suatu wilayah. Hal ini dapat diukur dengan analisis *Klassen Typology* jika sektor ekonomi masuk dalam klasifikasi sektor sedang tumbuh (*growing sector*) dan sektor maju tetapi tertekan (*retarded sector*) maka sektor tersebut termasuk sektor potensial untuk dikembangkan.

---

<sup>69</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, hlm. 13.

<sup>70</sup>“Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2016”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Agustus 2017. hlm. 56.

#### 5. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>71</sup>

#### 6. Ekonomi pembangunan Islam (syariah)

Ekonomi pembangunan Islam (syariah) adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>72</sup>

### F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Analisis *Location Quotient*

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Cilacap, digunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ). Metode ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional atau di tingkat regional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan merupakan sektor non basis.<sup>73</sup>

Menurut Arsyad (1999), rumus menghitung analisis LQ adalah:

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

<sup>71</sup>Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, hlm. 298.

<sup>72</sup>Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm. 13.

<sup>73</sup>M. Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, hlm. 183



Keterangan:

LQ : Koefisien *Location Quotient*

$v_i$  : Pendapatan sektor  $i$  di suatu daerah studi

$v_t$  : Pendapatan total daerah studi tersebut

$V_i$  : Pendapatan sektor  $i$  secara regional/nasional

$V_t$  : Pendapatan total regional/nasional.

Dari rumus di atas ada 3 kategori hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) dalam perekonomian daerah yaitu:

- 1) Jika nilai  $LQ > 1$ , maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Artinya, sektor tersebut dalam perekonomian daerah di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.
- 2) Jika nilai  $LQ < 1$  maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis.
- 3) Jika nilai  $LQ = 1$ , maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di wilayah referensi memiliki peningkatan.<sup>74</sup>

#### b. Analisis *Klassen Typology*

Analisis *Klassen Typology* digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi ini, dapat digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah pada masa mendatang. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam metode analisis ini, terdapat empat klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu: sektor tumbuh cepat (*rapid growth sector*), sektor tertekan (*retarded sector*), sektor sedang tumbuh (*growing sector*), dan sektor relatif tertinggal (*relatively backward sector*) yang dapat dilihat pada tabel 5. berikut:

---

<sup>74</sup>Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, "Penentu sektor Unggulan, hlm 42.

Tabel6. klasifikasi sektor ekonomi menurut metode *Klassen Typology*

r \ y	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
$r_i < r$	Sektor maju tetapi tertekan	Sektor relatif tertinggal

Sumber: Syafrizal (1997)

Keterangan:

$r_i$  : laju pertumbuhan sektor i,

$r$  : laju pertumbuhan PDRB,

$y_i$  : kontribusi sektor i terhadap PDRB,

$y$  :kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB.<sup>75</sup>



IAIN PURWOKERTO

<sup>75</sup>Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, "Penentu sektor Unggulan"

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Cilacap seluruhnya adalah 225.361 Ha (termasuk luas pulau Nusakambangan 11.511 Ha) atau sekitar 6,94% dari luas wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap secara Astronomi terletak diantara  $108^{\circ}4' 30''$  -  $109^{\circ} 30' 30''$  garis Bujur Timur dan  $7^{\circ}30' - 7^{\circ}45' 20''$  garis Lintang Selatan. Kabupaten Cilacap secara administratif terbagi menjadi 24 kecamatan, yang terdiri dari 269 desa dan 15 kelurahan.

Batasan wilayah Kabupaten Cilacap, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas; Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata-rata 1 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan dari utara ke selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang.

##### **2. Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

Visi pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 adalah:

**“Menjadi Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara Merata”**

###### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kabupaten Cilacap merumuskan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Perwujudan Demokratisasi dan Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemerintah yang Bersifat Entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government.
- 3) Peningkatan dan Perbaikan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu Masyarakat.
- 4) Pengembangan Perekonomian yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal dan Regional Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Industri dan dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja.
- 5) Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.
- 6) Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Secara Berkelanjutan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Rasional, Efektif dan Efisien.

### **3. Potensi Ekonomi Daerah**

#### **a. Bidang Perdagangan**

- 1) Sarana Perdagangan yang tersedia antara lain:
  - a) Pasar modern / Super market : 2 buah
  - b) Mini market / swalayan : 12 buah
  - c) Pasar tradisional / umum : 85 buah
  - d) Pasar ikan dan hewan : 5 buah
  - e) TPI Propinsi dan Kabupaten : 11 buah

f) Pertokoan / Ruko : 965 unit

2) Peluang investasi

Kabupaten Cilacap memiliki wilayah terluas di Jawa Tengah dengan didukung adanya industri/perusahaan besar yang cukup banyak sehingga terbuka peluang berdirinya pusat pertokoan, pasar swalayan, supermarket, perumahan, transportasi dan berbagai bidang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Produksi ikan laut per tahun 15.153,2 ton yang diperoleh dari 7 (tujuh) Tempat Pelelangan Ikan/TPI, namun sebagian besar melalui TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap dan kapasitas Dermaga 250 Kapal. Kegiatan Ekspor-impor lewat pelabuhan laut Tanjung Intan yang sudah dilakukan adalah impor sapi, bongkar muat pupuk Sriwijaya dan Ekspor-impor Minyak bumi.

b. Bidang Pariwisata

Potensi yang dimiliki Kabupaten Cilacap sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) cukup besar dengan adanya obyek wisata alam yang cukup beragam dan unik. Obyek wisata yang dimaksud antara lain: Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendem, Hutan Payau, Kampung Laut, Nusakambangan, Gunung Selok, dan lain-lain yang belum dikelola dengan optimal, terutama terkait pengembangan daya saing obyek wisata daerah.

c. Bidang Perikanan

1) *Perikanan Laut*

- a) Luas sebaran penangkapan 5.200 km<sup>2</sup>
- b) Jumlah Nelayan Laut 33.000 orang
- c) Armada Penangkapan 4.538 buah, terdiri dari : Perahu tanpa motor 649 buah, Motor Tempel 1.139 buah, Kapal Motor 2.639 buah, Kapal Long Line 115 buah, jumlah alat penangkapan sebanyak 107.523 unit.

*Sarana Pendukung :*

- a) Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dengan kapasitas 250 kapal
- b) Dermaga 7 unit
- c) TPI Propinsi / Kabupaten 11 buah
- d) Depot BBM 2 buah
- e) Galangan Kapal 4 buah
- f) Pabrik es kapasitas 236 ton 5 unit
- g) Cold storage kapasitas 75 ton 3 unit

Sistem penangkapan ikan oleh nelayan Cilacap belum ada yang mencapai lepas panti ZEEI. Oleh karena itu, dibutuhkan fasilitas/alat tangkap ikan yang digunakan untuk mencapai Zone tersebut, baik armada kapalnya maupun alat deteksi ikan / alat penginderaan ikan jarak jauh. Di samping itu juga akan segera dibangun Pasar Ikan Higienis di lokasi dekat Pantai.

*Peluang Investasi yang ada yaitu :*

- a) Pembangunan TPI terpadu di Jetis dengan nilai investasi 125 Milyar dengan sistem BOT (telah terhitung Fsnnya) karena Pelabuhan yang ada belum dapat menampung kapal dengan ukuran 100 GT.
  - b) Pendirian docking kapal terutama bagi kapal 100 GT
  - c) Usaha armada long line.
- 2) Perikanan Darat
- a) Jumlah Nelayan Perairan Umum : 9.000 orang
  - b) Potensi Lahan Tambak : 12.000 ha
  - c) Potensi Budidaya ikan air tawar : 2.500 ha

- d) Lokasi Budidaya ikan air tawar hampir di seluruh Kecamatan se Kab. Cilacap.
- e) Pembenuhan ikan : BBI seluas 4,07 ha dgn produksi benih tahun 2003 sebanyak 1.785.000 ekor, Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) dengan produksi benih sebanyak 12.750.000 ekor.
- f) Kebutuhan benih per tahun diperkirakan sebanyak 19.900.000 ekor.

#### *Peluang Investasi*

- a) Usaha bandeng sebagai umpan untuk penyediaan kapal-kapal longline karena selama ini umpannya mengambil dari luar daerah.
  - b) Usaha tempat pembenuhan ikan air tawar, dan payau/hatchery.
- 3) Budidaya Rumput Laut

Lahan yang berpotensi untuk dikembangkan budidaya rumput laut seluas 13.050 Ha yang terletak di pantai sebelah utara Pulau Nusakambangan. Peluang investasi budidaya rumput laut dengan pabrik pengolahannya.

#### 4) Budidaya Ikan Terapu

Potensi luas areal yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan kerapu seluas 891 Ha yang terletak disebelah selatan Pulau Nusakambangan dengan menggunakan sistem keramba.

#### d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

##### 1) Gambaran Umum

- a) Luas Hutan Negara di Kabupaten Cilacap adalah 54.669,80 Ha (terdiri dari Hutan Produksi 36.349,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas 10.601,70 Ha, Hutan Lindung 6.386,20 Ha dan Suaka Alam 1.332,80 Ha).

- b) Luas Hutan Rakyat 22.743,08 Ha (tanaman jati, mahoni, albasia, dll)
- c) Total luas hutan di Kab. Cilacap (Hutan Negara + Hutan Rakyat) adalah 77.412,88 Ha.
- d) Luas Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Negara (PTPN IX) di Kabupaten Cilacap adalah 8.771,82 Ha yang ditanami dengan tanaman karet dan kako.
- e) Luas kebun rakyat adalah 33.825,45 Ha (Tanama kelapa, kare, kopi, cengkeh, pala, kakao, dll).

## 2) Potensi Pengembangan

### a) Pengembangan albasia

Sebagai bahan baku industri kayu Luas tanaman albasia yang ada 1.000 Ha. Luas potensi pengembangan 2.000 Ha.

Lokasi : Kecamatan Jeruklegi, Kesugihan, Kawunganten, Cilacap Tengah dan Binangun. Nilai investasi 4,5 Milyar.

### b) Pengembangan karet rakyat

Luas tanaman karet rakyat yang telah dikembangkan 1.823,90 Ha. Telah tersedia 1 (satu) unit alat pengolah / pabrik karet (kapasitas 2,5 ton brown crepe/hari) di Desa Ciwalen Kec. Dayeuhluhur bantuan INGUB. Potensi pengembangan 5.000 Ha. Lokasi pengembangan di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja Majenang, Cipari dan Jeruklegi. Potensi industri yang dapat dikembangkan adalah industri sabutre, industri ban, dll.

### c) Pengembangan kayu putih sebagai minyak atsiri.

Luas tanaman kayu putih yang telah dikembangkan 200 Ha. Telah tersedia 1 unit alat pengolah di Kel. Kutawaru Kec. Cilacap Tengah bantuan dari PT. HOLCIM. Potensi



pengembangan 2.000 Ha dan Lokasi pengembangan di Kecamatan Patimuan, Cilacap Tengah dan Kawunganten.

d) Pengembangan jarak pagar dan nyamplung sebagai biofuel

Luas tanaman jarak pagar yang telah dikembangkan 371 Ha dan nyamplung 350 Ha. Telah tersedia 1 (satu) unit alat pengolah biji jarak pagar/nyamplung di Desa Karangmangu Kec. Kroya bantuan dari DEPPRERINDAG RI. Potensi pengembangan 2.400 Ha. Lokasi pengembangan di Kecamatan Kroya, Binangun, Nusawungu, Jeruklegi, Sampang, Maos dan Adipala.

e) Pengembangan nilam

Luas tanaman nilam yang telah dikembangkan 750 Ha. Potensi pengembangan 750 Ha. Lokasi pengembangan di kecamatan Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Cipari dan Jeruklegi.

e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi Bahan Galian Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah sebagai berikut:

1) Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi terdapat di Desa Cipari Kecamatan Dipari, telah dilakukan eksplorasi terhadap cekaman yang dilaksanakan oleh LUNDIN BANYHUMAS BV. dengan melakukan pemboran sumur uji sumur taruhan Jati I ) hingga ke dalam maksimal 15.000 ft dengan kesimpulan tidak ekonomis.

2) Batubara

Indikasi adanya potensi batubara terlihat dari adanya sisipan batu bara yang terdapat di wilayah Kecamatan Dayeuhluhur. Hasil penyelidikan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang bekerjasama dengan CV. Multi Geosintek tahun 2003 yang

telah dilakukan menyimpulkan bahwa batubara yang ada merupakan batubara muda (lignite) dengan nilai kalori <4.500 kcal/kg. Singkapan batubara juga terdapat di Desa Cidadap Kec. Karangpucung dengan hasil analisa proksimat PT. Star Polaris pada Mei 2006, nilai kalori potensi batubara tersebut berkisar 3724 sd 3890 cal/gr (adb).

### 3) Emas

Indikasi adanya emas Terdapat di Desa Jambu Kecamatan Wanareja dan Desa Sadahayu Kecamatan Majenang. Cadangan Emas tersebut pernah dieksplorasi oleh PT. Gama Grahita dengan luas areal 2.000 hektar, kemudian dilakukan Eksplorasi oleh PT. Multi Daya Sempama. Hasil Eksplorasi kandungan emas tersebut antara 4 gr/ton sampai 7 gr/ton. Potensi tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

### 4) Pasir Besi

Endapan Pasir Besi tersebut sepanjang pesisir pantai Kabupaten Cilacap, sebagian besar telah ditambang oleh PT. ANTAM Tbk, cadangan tersisa seluas 500 hektar lebih dengan MD 12.20 %, kandungan Fe>53% terletak di Desa Welahan Wetan Kecamatan Binangun hingga Desa Jetis Kecamatan Nusawungu, cadangan tersisa 744.678,85 ton saat ini telah diusahakan oleh 4 pemegang Kuasa Pertambangan.

### 5) Bentonit

Terdapat di Kecamatan Karangpucung yang meliputi Desa Tayem, Desa Sumber Sari, Desa Surian dengan luas masing-masing 1 hektar, 8 hektar dan 1 hektar. Hasil identifikasi cadangan Bentonit pada Desa Tayem yaitu: Swelling Index 42-166%, Bleaching Index 79-89 %, CaO 25%, MgO 1,33 - 5,55%, TiO<sub>2</sub> 0,22 -0,73%, Na<sub>2</sub>O<1,37%. Sejumlah cadangan ada pula di Desa

Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan yang perlu penelitian lebih lanjut.

6) Trass

Terdapat di Kecamatan Cimanggu yang meliputi Desa Cimanggu, Cigintung, Bantarpanjang, Genteng, Sindanghayu, Tepungsari dengan jumlah cadangan keseluruhan 83.022.500 m<sup>3</sup>. Hasil analisa Trass daerah Bantarpanjang adalah Indeks Aktivitas 7 hari = 68,9%: Indeks Aktivitas 28 hari = 73% dan Indeks Aktivitas 7 hari = 64,4%. Indeks Aktivitas 28 hari = 74%. Untuk daerah Bantar Mangu dengan acuan CPI-SP-008.

7) Talk

Cadangan tersingkap terdapat di Kecamatan Karangpucung, belum dieksplorasi secara detail.

8) Andesit

Cadangan Andesit atau yang biasa disebut batu gunung terdapat di beberapa desa di Kecamatan Kesugihan ( $\pm$  1.500.00 m<sup>3</sup>, dengan tanah penutup/Overburden (OB) rata - rata 0,5 - 2meter), Kecamatan Jeruklegi yang meliputi Desa Karang Kemiri (1.500.000 m<sup>3</sup>, OB 2-4 meter) Desa Ciwuni (300.000 m<sup>3</sup>, OB 0,5 - 1 meter), juga terdapat di Kecamatan Majenang dan Kecamatan Dayeuhluhur.

9) Gamping

Terdapat di Pulau Nusakambangan dengan jumlah cadangan berkisar 1.170.000.000 ton yang merupakan Gamping Terumbu yang saat ini sedang ditambang oleh PT. Holcim. Komposisi kimia gamping tersebut terdiri dari CaO>50%; MgO<1%. Sejumlah cadangan Gamping terdapat di Desa Tayem Kecamatan Karangpucung dengan komposisi CaO>50%: MgO<1%. Sejumlah cadang Gamping terdapat di Desa Tayem

Kecamatan Karangpucung dengan komposisi  $\text{CaO} > 50\%$ ,  $\text{MgO}$ ,  $1\%$  dalam bentuk lensa - lensa.

#### 10) Pasir Sungai dan Pasir Batu (Sirtu)

Terdapat di sungai Serayu, Cijalu, Citanduy, Cibaganjing, Cebeet, dan Cikawung, yang saat ini diusahakan oleh penambang rakyat.

#### 11) Lempung

Tersebar di Kecamatan Jeruklegi (ditambang PT. Holcim) dan di beberapa Desa di Kecamatan Adipala dengan Kandungan  $\text{SiO}_2$   $56,6\%$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$   $16,08\%$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$   $10,47\%$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$   $1,58\%$ ;  $\text{K}_2\text{O}$   $1,58\%$  dengan kandungan mineral monmorelonite, kwarsa dan albite.

#### 12) Tanah Urug

Banyak terdapat di Kecamatan Adipala, Kecamatan Kesugihan, dan Kecamatan Jeruklegi.

## B. Pembahasan

### 1. Sektor Dominan Kabupaten Cilacap 2014-2016

Tiga kategori ekonomi dominan adalah tiga kategori yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten/Kota tersebut. Tiga kategori tersebut menggambarkan corak ekonomi suatu wilayah.<sup>76</sup>

Tabel 7. Kontribusi Produk Domestik Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas Tahun 2014-2016 (Juta Rupiah dan Persen)

Kategori	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.030.826,1	16,44	6.405.714,7	16,54	6.604.527,0	16,24
B	Pertambangan dan Penggalian	2.338.906,0	6,37	2.345.647,8	6,06	2.348.588,3	5,78
C	Industri Pengolahan	12.134.375,6	33,07	12.580.130,5	32,49	13.147.441,8	32,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	52.780,0	0,14	60.848,0	0,16	70.413,0	0,17

<sup>76</sup> Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2014, BAPPEDA dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015. Hlm. 9.

Kategori	Uraian	2014		2015		2016	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.270,4	0,09	31.300,9	0,08	31.940,4	0,08
F	Konstruksi	3.730.933,1	10,17	3.997.282,7	10,32	4.358.149,7	10,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.114.354,5	11,21	4.364.309,2	11,27	4.652.880,6	11,44
H	Transportasi dan Pergudangan	2.028.563,5	5,53	2.228.324,1	5,76	2.329.629,6	5,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	787.181,3	2,15	844.767,3	2,18	885.068,2	2,18
J	Informasi dan Komunikasi	1.253.535,0	3,42	1.416.984,6	3,66	1.515.055,3	3,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	615.958,4	1,68	662.798,3	1,71	716.562,8	1,71
L.	Real Estate	680.423,8	1,85	730.538,8	1,89	774.942,9	1,91
M, N	Jasa Perusahaan	109.128,3	0,30	119.733,9	0,31	128.885,0	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	865.731,9	2,36	920.791,1	2,38	942.985,3	2,32
P	Jasa Pendidikan	1.113.730,2	3,04	1.158.706,0	2,99	1.238.907,7	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240.651,9	0,66	263.244,9	0,68	289.864,1	0,71
R,S,T,U	Jasa lainnya	565.538,3	1,54	588.446,5	1,52	625.050,7	1,54
<b>PDRB</b>		<b>36.693.889,0</b>	<b>100,00</b>	<b>38.719.569,6</b>	<b>100,00</b>	<b>40.660.892,5</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Melihat pada tabel di atas, dari struktur ekonomi Kabupaten Cilacap yang paling dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB tanpa Migas adalah sektor Industri Pengolahan; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor penyumbang terbesar meskipun tanpa Migas bagi pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap, yang berturut-turut dengan nilai kontribusi sebesar 12.134.375,6 atau 33,07 persen tahun 2014, 12.580.130,5 atau 32,49 persen pada tahun 2015, dan 13.147.441,8 atau 32,33 persen pada tahun 2016.

Sektor kedua terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Kontribusi sektor tersebut

berturut-turut dengan nilai sebesar 6.030.826,1 atau 16,44 persen pada tahun 2014, 6.405.712,7 atau 16,54 persen pada tahun 2015, dan 6.604.527,0 atau 16,24 persen pada tahun 2016.

Sektor ketiga terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi sektor tersebut berturut-turut dengan nilai sebesar 4.114.354,5 atau 11,21 persen pada tahun 2014, 4.364.309,2 atau 11,27 persen pada tahun 2015, dan 4.652.880,6 atau 11,44 persen pada tahun 2016.

Secara umum apabila hasil pengilangan minyak tidak diikuti sertakan dalam penghitungan, maka dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan kontribusi ekonomi di Kabupaten Cilacap relatif terjaga pada kisaran lima persen. Apabila subkategori usaha Industri Pengilangan Migas disertakan dalam penghitungan PDRB maka pertumbuhan kontribusi ekonomi di kabupaten Cilacap akan sangat menunjukkan fluktuatif. Hal ini disebabkan hasil industri pengilangan minyak di PERTAMINA RU IV Cilacap sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi pengolahan minyak pada setiap tahunnya dan besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta harga pada saat itu.<sup>77</sup>

## 2. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Cilacap 2014-2016

Sektor basis dan non basis di Kabupaten Cilacap dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) yaitu membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional atau di tingkat regional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan sektor non basis.<sup>78</sup>

Menurut Arsyad (1999), rumus menghitung analisis LQ adalah:

<sup>77</sup> PDRB 2012-2016 kab. Cilacap. Hlm. 52

<sup>78</sup> Kuncoro, M, *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 183

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Keterangan:

LQ : Indeks *Location Quotient*

vi : Pendapatan sektor i di suatu daerah studi

vt : Pendapatan total daerah studi tersebut

Vi : Pendapatan sektor i secara regional/nasional,

Vt : Pendapatan total regional/nasional.

Dari rumus di atas ada 3 kategori hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) dalam perekonomian daerah yaitu:

- 1) Jika nilai  $LQ > 1$ , maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Artinya, sektor tersebut dalam perekonomian daerah di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.
- 2) Jika nilai  $LQ < 1$  maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non basis.
- 3) Jika nilai  $LQ = 1$ , maka sektor yang bersangkutan baik di wilayah studi maupun di wilayah referensi memiliki peningkatan.<sup>79</sup>

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2016).

Tabel 8. Hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Cilacap

Kategori	Uraian	Nilai LQ ( <i>Location Quotient</i> )			Rata-rata
		2014	2015	2016	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,51	0,52	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	1,38	1,34	1,13	1,28
C	Industri Pengolahan	1,99	2	2,02	2,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	0,63	0,67	0,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	0,51	0,5	0,5	0,50
F	Konstruksi	0,45	0,45	0,46	0,45

<sup>79</sup>Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, "Penentu sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir: *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*", Vol. 10, nomor 1, 2015. Hlm 42.

Kategori	Uraian	Nilai LQ ( <i>Location Quotient</i> )			Rata-rata
		2014	2015	2016	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	0,34	0,35	0,35	0,35
H	Transportasi dan Pergudangan	0,75	0,76	0,75	0,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,31	0,3	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,38	0,39	0,39	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	0,28	0,28	0,28
L	Real Estate	0,45	0,45	0,45	0,45
M,N	Jasa Perusahaan	0,4	0,4	0,39	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,38	0,38	0,38	0,38
P	Jasa Pendidikan	0,37	0,36	0,36	0,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,37	0,38	0,38	0,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,44	0,44	0,43	0,44

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa terdapat dua sektor yang menjadi sektor basis ( $>1$ ) di Kabupaten Cilacap yaitu: sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan. Selain kedua sektor tersebut, semua menjadi sektor non basis atau sektor penunjang bagi perekonomian daerah.

Pada kurun waktu 2014-2016 kedua sektor tersebut memiliki nilai LQ  $>1$ , artinya kedua sektor tersebut merupakan sektor basis yang cenderung dapat mengekspor ke daerah lain. Sektor yang memiliki nilai LQ paling besar terdapat pada sektor industri pengolahan, dengan kisaran nilai LQ secara berturut-turut adalah 1,99; 2,00; dan 2,02. Hal ini disebabkan karena produksi sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Cilacap telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lainnya, misalnya dengan adanya industri pengilangan Migas (PERTAMINA), industri semen, industri pengalengan ikan, tepung dan gula revina Kabupaten Cilacap yang dapat mengekspor hasil produksi industri tersebut ke berbagai daerah sekitarnya.

Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor basis kedua setelah sektor Industri Pengolahan, dengan kisaran nilai LQ adalah 1,38; 1,34; dan 1,13. Hal ini disebabkan oleh kayanya SDA Kabupaten Cilacap



akan bahan pertambangan dan penggaliannya, sehingga sektor ini masuk dalam kategori sektor basis. Itu berarti bahwa, sektor ini merupakan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif atau keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) bagi daerah Kabupaten Cilacap, yang mana hasil produksi (*output*) dari sektor ini adalah sebagai salah satu *input* bagi sektor Industri Pengolahan yang juga sebagai sektor basis dengan presentase terbesar. Adapun subkategori dari sektor ini adalah pertambangan minyak dan gas bumi (Migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya.

### 3. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Cilacap 2014-2016

Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap, peneliti menggunakan metode analisis *Klassen Typology*. Metode analisis tersebut digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi ini, dapat digunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah pada masa mendatang. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah.

Dalam metode analisis ini, terdapat empat klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu: sektor tumbuh cepat (*rapid growth sector*), sektor tertekan (*retarded sector*), sektor sedang tumbuh (*growing sector*), dan sektor relatif tertinggal (*relatively backward sector*) yang dapat dilihat pada tabel 5. berikut:

Tabel9. klasifikasi sektor ekonomi menurut metode *Klassen Typology*

$r \backslash y$	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Sektor maju dan tumbuh cepat	Sektor berkembang cepat
$r_i < r$	Sektor maju tetapi tertekan	Sektor relatif tertinggal

Sumber: Syafrizal (1997)

## Keterangan:

$r_i$  : laju pertumbuhan sektor  $i$ ,

$r$  : laju pertumbuhan PDRB,

$y_i$  : kontribusi sektor  $i$  terhadap PDRB,

$y$  : kontribusi rata-rata sektor terhadap PDRB.<sup>80</sup>

Berikut merupakan tabel hasil perhitungan *Klassen Typology* Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu tiga tahun (2014-2016).

Tabel 10. Perhitungan klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi menurut metode *Klassen Typology*

Uraian	Analisis <i>Klassen Typology</i> tahun 2014-2016						klasifikasi TK
	R <sub>i</sub>	R	</>	Y <sub>i</sub>	Y	</>	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,22	5,29	<	16,41	5,88	>	sektor maju tapi tertekan
Pertambangan dan Penggalian	8,58	5,29	>	6,07	5,88	>	sektor maju dan tumbuh cepat
Industri Pengolahan	3,88	5,29	<	32,63	5,88	>	sektor maju tapi tertekan
Pengadaan Listrik dan Gas	17,30	5,29	>	0,16	5,88	<	sektor berkembang cepat
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	2,16	5,29	<	0,08	5,88	<	sektor relatif tertinggal
Konstruksi	6,89	5,29	>	10,4	5,88	>	sektor maju dan tumbuh cepat
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	6,33	5,29	>	11,31	5,88	>	sektor maju dan tumbuh cepat
Transportasi dan Pergudangan	8,13	5,29	>	5,67	5,88	<	sektor berkembang cepat
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	5,29	>	2,17	5,88	<	sektor berkembang cepat
Informasi dan Komunikasi	12,78	5,29	>	3,60	5,88	<	sektor berkembang cepat
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,21	5,29	>	1,70	5,88	<	sektor berkembang cepat
Real Estate	8,33	5,29	>	1,88	5,88	<	sektor berkembang cepat

<sup>80</sup>Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, "Penentu sektor Unggulan dalam Pembangunan, hlm 42.

Jasa Perusahaan	9,18	5,29	>	0,31	5,88	<	sektor berkembang cepat
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,50	5,29	<	2,35	5,88	<	sektor relatif tertinggal
Jasa Pendidikan	6,06	5,29	>	3,03	5,88	<	sektor berkembang cepat
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,48	5,29	>	0,68	5,88	<	sektor berkembang cepat
Jasa Lainnya	6,21	5,29	>	1,53	5,88	<	sektor berkembang cepat

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang masuk dalam empat klasifikasi *Klassen typology*, yaitu yang pertama sektor maju dan tumbuh cepat (kelas I) yang terdiri dari sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Konstruksi, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor. Kedua sektor maju tapi tertekan (kelas II) yang terdiri dari sektor Pertanian; Kehutanan; dan Perikanan, serta Industri Pengolahan. Ketiga sektor berkembang cepat (kelas III) yang terdiri dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya. Keempat sektor relatif tertinggal yang terdiri dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel 11. Hasil Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Periode 2014-2015

r \ y	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	<i>Sektor maju dan tumbuh cepat</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan dan Penggalian</li> <li>• Konstruksi</li> <li>• Perdagangan Besar dan</li> </ul>	<i>Sektor berkembang cepat</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>• Transportasi dan Pergudangan</li> <li>• Penyediaan Akomodasi dan</li> </ul>

r \ y	$y_i > y$	$y_i < y$
	Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	Makan Minum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dan komunikasi</li> <li>• Jasa Keuangan dan Asuransi</li> <li>• Real Estate</li> <li>• Jasa Perusahaan</li> <li>• Jasa pendidikan</li> <li>• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> <li>• Jasa Lainnya</li> </ul>
$r_i < r$	<i>Sektor maju tetapi tertekan</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>• Industri Pengolahan</li> </ul>	<i>Sektor relatif tertinggal</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang</li> <li>• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> </ul>

Sumber: Tabel 9 perhitungan metode *Klassen Typology*

#### 4. Pembahasan Per Sektor Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2016

Tahap ini untuk mengambil kesimpulan dengan menggabungkan kedua hasil alat analisis, yaitu analisis *Location Quotien (LQ)* dan *Klassen Typology* serta melihat kontribusi atau peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Cilacap.

##### a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

Dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata nilai kontribusi sebesar 16,41 persen dan merupakan ketiga penyumbang terbesar. Dari nilai tersebut sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tergolong menjadi sektor dominan dan sekalipun menjadi corak perekonomian di Kabupaten Cilacap karena masuk dalam tiga sektor dominan.

Dari hasil analisis *Location Quotient (LQ)*, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan nilai LQ rata-rata sebesar

0,51 ( $<1$ ), ini artinya bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor non basis.

Selanjutnya Hasil dari analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masuk dalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan. Artinya, laju pertumbuhan sektor tersebut lebih rendah daripada laju rata-rata pertumbuhan seluruh sektor ekonomi terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan penurunan produktivitas sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama kurun waktu tiga tahun (2014-2016).

Tabel 12. Analisis Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2016

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	II	sektor maju tapi tertekan

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sektor dominan yang memiliki peranan penting bagi pembentukan PDRB, tetapi sektor ini merupakan sektor non basis dan masuk dalam klasifikasi pertumbuhan sektor maju tapi tertekan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor dominan atau corak perekonomian Kabupaten Cilacap itu didasarkan pada sektor ini mempunyai keunggulan komparatif dari luasnya lahan pertanian dan kehutanan yang mana dilihat dari sisi keruangan daerah Kabupaten Cilacap sebagian besar merupakan pedesaan serta subsektor perikanan yang sangat berpotensi karena keberadaan laut dan sungai-sungainya. Di Kabupaten Cilacap sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar meskipun kontribusi terhadap PDRB sektor Industri Pengolahan yang mendominasi. Selain itu, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga berfungsi sebagai sumber pertumbuhan di sektor Industri Pengolahan lewat *intermediate demand effect* atau

keterkaitan produksi: *output* dari industri menjadi *input* bagi pertanian.

Dari berbagai peranan penting tersebut, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki tantangan, yaitu laju pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan, hal ini juga dibuktikan oleh analisis LQ dan *Klassen Typology* yang menunjukkan bahwa sektor tersebut tergolong sebagai sektor non basis dan sektor maju tapi tertekan. Jika penurunan produktivitas itu tidak segera ditangani, bisa berpengaruh pada tingkat pendapatan riil perkapita dan kesejahteraan penduduk yang bermata pencaharian di sektor ini. Jadi, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus lebih meningkatkan prioritas pembangunan di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

b. Pertambangan dan Penggalian;

Dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016 sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang tidak begitu besar dalam kontribusinya terhadap PDRB. Rata-rata nilai kontribusinya sebesar 6,07 persen. Kontribusi sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan.

Meskipun tidak begitu besar dalam kontribusinya terhadap PDRB, sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang masuk dalam kategori sektor basis. Hal itu sesuai dengan perhitungan LQ yang menunjukkan nilai LQ sektor Pertambangan dan Penggalian  $>1$  yaitu 1,28. Jadi, sektor ini merupakan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif atau keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) bagi daerah Kabupaten Cilacap.

Kemudian hasil dari analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian masuk dalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh. Artinya, laju pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian lebih besar dari pada laju pertumbuhan

PDRB dan persentase kontribusi sektor tersebut juga lebih besar daripada persentase rata-rata seluruh sektor ekonomi terhadap PDRB dalam periode 2014-2016.

Tabel 13. Analisis Sektor Pertambangan dan Penggalian

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Quotient</i> (LQ)	>1	sektor Basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	I	sektor maju dan cepat tumbuh

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor maju yang mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Cilacap. Hal itu menegaskan bahwa, sektor ini pantas mendapatkan prioritas kebijakan dalam pembangunan ekonomi daerah baik dari sisi produktivitas maupun dari ketersediaan (*availability*) sumberdayanya.

c. Industri Pengolahan;

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dominan sebagai penyumbang terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap, dengan persentase rata-rata sebesar 32,63 persen (tanpa Migas). Sektor Industri Pengolahan menjadi tulang punggung perekonomian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap, karena kontribusinya yang besar berperan sangat penting sebagai motor penggerak pembangunan perekonomian daerah.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa nilai LQ rata-rata sektor Industri pengolahan adalah sebesar 2,00 (>1), yang artinya sektor Industri Pengolahan merupakan sektor basis. Jadi, sektor ini merupakan sektor yang mempunyai keunggulan komparatif atau keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) bagi daerah Kabupaten Cilacap.

Selanjutnya hasil dari analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor Industri Pengolahan masuk dalam klasifikasi sektor maju tapi tertekan. Artinya, laju pertumbuhan sektor tersebut lebih

rendah daripada laju rata-rata pertumbuhan seluruh sektor ekonomi terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan penurunan produktivitas sektor Industri Pengolahan selama kurun waktu tiga tahun (2014-2016).

Tabel 14. Analisis Sektor Industri Pengolahan

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	>1	sektor Basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	II	sektor maju tapi tertekan

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dominan sekalipun sektor basis yang sangat berperan penting bagi perekonomian daerah Kabupaten Cilacap, namun untuk beberapa periode terakhir (2014-2016) laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan cenderung tertekan. Hal itu menegaskan bahwa, sektor Industri Pengolahan harus lebih ditingkatkan pengembangannya sebagai prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap dalam periode mendatang.

d. Pengadaan Listrik dan Gas;

Sektor Pengadaan listrik dan Gas telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 0,16 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas dari tahun 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Pengadaan Listrik dan Gas adalah <1. Artinya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini cenderung hanya memenuhi kebutuhan daerah sendiri.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Pengadaan Listrik dan Gas masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut



mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 15. Analisis Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	<1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Pengadaan Listrik dan Gas merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Pengadaan Listrik dan Gas tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial.

e. Pengadaan Air;

Sektor Pengadaan Air telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 0,08 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Pengadaan Air dari tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Pengadaan Air adalah <1. Artinya, sektor Pengadaan Air merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini cenderung hanya memenuhi kebutuhan daerah sendiri.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Pengadaan Air masuk dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal. Artinya, sektor tersebut tidak mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 16. Analisis Sektor Pengadaan Air

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	<1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	IV	sektor relatif tertinggal

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Pengadaan Air merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, bahkan masuk dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Pengadaan Air tidak menjadi prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Cilacap.

f. Konstruksi;

Dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016 sektor Konstruksi merupakan sektor yang relatif besar dalam kontribusinya terhadap PDRB. Rata-rata nilai kontribusinya sebesar 10,64 persen. Kontribusi sektor Konstruksi pada tahun 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Konstruksi adalah  $<1$ . Artinya, sektor Konstruksi merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini cenderung hanya memenuhi kebutuhan daerah sendiri.

Kemudian hasil dari analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor Konstruksi masuk dalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh. Artinya, laju pertumbuhan sektor Konstruksi lebih besar dari pada laju pertumbuhan PDRB dan persentase kontribusi sektor tersebut juga lebih besar daripada persentase rata-rata seluruh sektor ekonomi terhadap PDRB dalam periode 2014-2016.

Tabel 17. Analisis Sektor Kontruksi

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient</i> (LQ)	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	I	sektor maju dan cepat tumbuh

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor Konstruksi merupakan sektor yang relatif besar dalam kontribusinya terhadap PDRB dan sektor yang masuk dalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh, meskipun bukan sektor basis. Jadi, itu

menunjukkan bahwa keberadaan sektor Konstruksi pantas mendapatkan prioritas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap pada periode mendatang.

g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Dalam kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016 sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dominan atau ketiga terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB. Rata-rata nilai kontribusinya sebesar 11,31 persen. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah  $<1$ . Artinya, sektor tersebut merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini cenderung hanya memenuhi kebutuhan daerah sendiri.

Kemudian hasil dari analisis *Klassen Typology* menunjukkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masuk dalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh. Artinya, laju pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor lebih besar dari pada laju pertumbuhan PDRB dan persentase kontribusi sektor tersebut juga lebih besar daripada persentase rata-rata seluruh sektor ekonomi terhadap PDRB dalam periode 2014-2016.

Tabel 18. Analisis Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	I	sektor maju dan cepat tumbuh

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

merupakan sektor dominan dalam kontribusinya terhadap PDRB dan sektor yang masuk dalam klasifikasi sektor maju dan cepat tumbuh, meskipun bukan sektor basis. Jadi, itu menegaskan bahwa keberadaan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap pada periode mendatang.

h. Transportasi dan Pergudangan;

Sektor Transportasi dan Pergudangan telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 5,67 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Transportasi dan Pergudangan tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Transportasi dan Pergudangan adalah  $<1$ . Artinya, sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Transportasi dan Pergudangan masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 19. Analisis Sektor Transportasi dan Pergudangan

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang

berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 2,17 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari tahun 2014-2016 cenderung stagnan/tetap.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah  $<1$ . Artinya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 20. Analisis Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak boleh

dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

j. Informasi dan Komunikasi;

Sektor Informasi dan Komunikasi telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 3,60 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Informasi dan Komunikasi dari tahun 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Informasi dan Komunikasi adalah  $<1$ . Artinya, sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 21. Analisis Sektor Informasi dan Komunikasi

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Informasi dan Komunikasi tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

k. Jasa Keuangan;

Sektor Jasa Keuangan telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 1,70 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Jasa Keuangan dari tahun 2014-2016 cenderung stagnan/tetap.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Jasa Keuangan adalah  $<1$ . Artinya, sektor Jasa Keuangan merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Jasa Keuangan masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 22. Analisis Sektor Jasa Keuangan

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Jasa Keuangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Jasa Keuangan tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

1. Real Estate;

Sektor Real Estate telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 1,88 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Real Estate dari tahun 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Real Estate adalah  $<1$ . Artinya, sektor Real Estate merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Real Estate masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 23. Analisis Sektor Real Estate

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	$<1$	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Real Estate merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Real Estate tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

m. Jasa Perusahaan;

Sektor Jasa Perusahaan telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 0,31 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Jasa Perusahaan dari tahun 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Jasa Perusahaan adalah  $<1$ . Artinya, sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Jasa Perusahaan masuk dalam klasifikasi



sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 24. Analisis Sektor Jasa Perusahaan

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	<1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Jasa Perusahaan tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 2,35 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2016 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib adalah <1. Artinya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini cenderung hanya memenuhi kebutuhan daerah sendiri.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masuk dalam klasifikasi sektor relatif

tertinggal. Artinya, sektor tersebut tidak mempunyai potensi yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 25. Analisis Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	<1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	IV	sektor relatif tertinggal

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, bahkan masuk dalam klasifikasi sektor relatif tertinggal. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tidak menjadi prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Cilacap.

o. Jasa Pendidikan;

Sektor Jasa Pendidikan telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 3,03 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Jasa Pendidikan tahun tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Jasa Pendidikan adalah <1. Artinya, sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Jasa Pendidikan masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 26. Analisis Sektor Jasa Pendidikan

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	<1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Jasa Pendidikan tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 0,68 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tahun dari 2014-2016 terus mengalami pertumbuhan.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial adalah <1. Artinya, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 27. Analisis Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	<1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

q. Jasa Lainnya.

Sektor Jasa Lainnya telah menyumbang bagi PDRB Kabupaten Cilacap dengan nilai rata-rata persentase sebesar 1,53 persen selama periode 2014-2016. Dalam kontribusinya, sektor Jasa Lainnya tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Menurut hasil dari analisis LQ menunjukkan bahwa, nilai LQ sektor Jasa Lainnya adalah <1. Artinya, sektor Jasa Lainnya merupakan sektor non basis di Kabupaten Cilacap. Jadi, sektor ini bukan termasuk sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

Kemudian menurut hasil dari analisis *Klassen Typology*, menunjukkan bahwa sektor Jasa Lainnya masuk dalam klasifikasi sektor berkembang cepat. Artinya, sektor tersebut mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 28. Analisis Sektor Jasa Lainnya

No.	Aspek	Parameter	Keterangan
1.	<i>Location Qoutient (LQ)</i>	>1	sektor non basis
2.	<i>Klassen Typology</i>	III	sektor berkembang cepat

Sumber: tabel 7,9 dan 10

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sektor Jasa Lainnya merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB meskipun tidak begitu besar dan bukan termasuk sektor basis, tetapi sektor ini merupakan sektor yang berkembang cepat. Jadi, itu menunjukkan bahwa keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan tidak boleh dilupakan dalam pengembangannya, karena termasuk sektor potensial di Kabupaten Cilacap.

## **5. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prioritas pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Cilacap yang juga menunjukkan potensinya bahwa terdapat sektor-sektor untuk dikembangkan di masa sekarang serta di masa yang akan datang guna menciptakan kesempatan kerja dan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam jangka panjang sebagai upaya dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam tentu teori-teori serta hasil analisis harus berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran maupun Al-Hadits. Karena apa yang dilakukan di dunia haruslah dipertanggungjawabkan di akhirat.

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya manusia atas kerjasama dan partisipasi. Secara *inheren* ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam harus dipelajari secara kaffah dan komprehensif oleh umatnya. Dalam hal ini, penelitian mengenai sektor basis/non basis, sektor potensial/non potensial, serta potensi daerah yang ketika hasilnya telah terurai maka perlu perencanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam terutama dalam mengaplikasikan kebijakan yang dibuat pemerintah, masyarakat ataupun yang berkepentingan agar apa yang dilakukan tidak saja bermanfaat bagi kepentingan bersama tapi mendapat nilai pahala di sisi-Nya.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang luas yang di dalamnya terkandung dasar hukum yang jelas dan banyak para ahli sudah menanggapi hal itu. Oleh karena itu dalam perspektif Islam, seperti apa langkah yang harus dilakukan ketika sudah mengetahui sektor basis non Migas dan sektor potensialnya tentu perlu dilakukan dan diterapkan, karena hal ini merupakan jalan untuk mensejahterakan masyarakat (umat manusia) dengan cara mengelola sumber daya dengan baik bukan merusaknya, memberikan keadilan, adanya keseimbangan ekonomi, serta menerapkan ilmu dan iman.

Seperti yang dijelaskan pada Q.S. Al-A'raf 56-58:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

“(56) dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (57) dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (58) dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh

merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”<sup>81</sup>

Jika ayat ini dihubungkan dengan pembangunan ekonomi, ini artinya dalam tingkatan perekonomian baik dalam perubahan klasifikasi pertumbuhan maupun dalam pengembangan setiap sektor baik sektor industri, pertanian, perdagangan dan lainnya tidaklah dibenarkan berbuat kerusakan atau melupakan peranan sektor yang telah menghidupi masyarakat banyak demi sektor yang memberi keuntungan besar hanya pada segelintir masyarakat. Allah menciptakan bumi ini (seluruh isinya) dalam keadaan baik dan sempurna sehingga manusia (masyarakat) dapat mengelolanya. Jikapun ada kerusakan atau pengelolaan yang tidak baik maka kerusakan itu akibat ulah manusia itu sendiri. Jika kerusakan itu terjadi berkepanjangan akan berdampak negatif pada keadaan dimasa yang akan datang dan jelas dapat membuat pertumbuhan turun.

Untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik tentu tidak ada eksploitasi sumber-sumber ekonomi maupun eksploitasi tenaga kerja. Ini artinya, sektor tertinggi dalam struktur ekonomi yang menyumbangkan nilai terbesar bagi PDRB seharusnya mampu untuk benar-benar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal khususnya guna memenuhi seluruh kebutuhan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan antara nilai PDRB yang tinggi dengan tingkat pendapatan masyarakat lokal yang rendah yang menyebabkan kemiskinan.

Dalam hal ini tentu membutuhkan strategi yang matang sehingga strategi tersebut akan membawa banyak dampak terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk melakukan strategi yang matang tersebut jelas membutuhkan bidang-bidang keilmuan yang tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan tentu harus berbekal iman dalam melakukannya seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11:

---

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 157-158.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut memperlihatkan bahwa dalam bekerja harus berbekal iman dan ilmu serta dalam bekerja hendaknya membuat perencanaan terlebih dahulu agar semua masyarakat mendapat kesempatan dalam mengakses sumber daya atau sektor-sektor yang menunjang bagi perekonomian. Disini ekonomi Islam mempunyai prinsip dalam membuat sebuah perencanaan yang menunjukkan peran dan fungsi negara/pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu prinsip keadilan. Titik berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi atau melakukan perencanaan. Di Kabupaten Cilacap yang bisa dijadikan simpul terlemah adalah masyarakat yang berpendapatan rill perkapita rendah, dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah ini cenderung berada di daerah pedesaan dan bermata pencaharian pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Meski sektor-sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja, namun sektor Industri Pengolahan (Migas) yang memiliki kontribusi paling besar dalam PDRB. Dan itu menunjukkan bahwa perlunya pengembangan kedua sektor tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.



Oleh karena itu, melihat dari hasil analisis yang menjadi sektor basis menurut metode analisis LQ Kabupaten Cilacap memiliki dua sektor basis yaitu sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya masuk dalam kategori sektor non basis dan sektor maju tetapi tertekan (hasil analisis *Klassen Typology*) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masuk dalam kategori sektor non basis dan sektor maju dan tumbuh cepat (hasil analisis *Klassen Typology*).

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan produktifitas pada sektor dominan Kabupaten Cilacap yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Jadi harus ada keterkaitan output dan input pada sektor tersebut khususnya sektor Industri Pengolahan (non Migas), ini penting agar keuntungan pertumbuhan dapat dirasakan di sektor yang menyerap tenaga kerja dan berpendapatan rendah (sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan). Seperti halnya yang dijelaskan pada point strategi Industrialisasi; subbab Industrialisasi berbasis pertanian dan subbab alternatif strategi industrialisasi. Dan juga dorongan dari sektor-sektor potensial non Migas yang masih belum maksimal atau belum dikembangkan lebih lanjut dalam pemanfaatannya oleh pemerintah daerah dan masyarakat juga harus menjadi perhatian, untuk menambah akses perekonomian bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin. Sehingga akan terwujud suatu keseimbangan dimana sebuah pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan produktivitas sektoral seperti yang menjadi tujuan dalam pembangunan ekonomi Islam.

## **6. Sektor Basis dan Potensial Sebagai Prioritas dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Cilacap**

### **a. Pengembangan Sektor Basis Non Migas**

Pengembangan Sektor Basis non Migas merupakan suatu proses pengembangan dengan pendekatan sektoral non Migas yang

memiliki keunggulan komparatif dan keuntungan kompetitif sebagai skala prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan dari hasil alat analisis *Location Quotien* (LQ) teridentifikasi dua sektor yang harus menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Cilacap yaitu: sektor Industri Pengolahan (tanpa Migas); sektor Pertambangan dan Penggalian.

b. Pengembangan Sektor Potensial

Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.<sup>82</sup>

Jadi, Pengembangan Sektor Potensial merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang mempunyai potensi dan layak untuk dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah.

Berdasarkan dari hasil alat analisis *Klassen typology* yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sektor ekonomi yang teridentifikasi sektor maju tapi tertekan dan sektor berkembang cepat (potensial) sebanyak sebelas sektor yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya. sebelas sektor tersebut tidak boleh dilupakan dalam pembangunan ekonomi, dan juga sektor yang masuk dalam kategori sektor maju dan berkembang cepat tetapi tidak masuk dalam kategori sektor basis yaitu sektor Konstruksi, serta sektor Perdagangan Besar

---

<sup>82</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 99.

dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebab memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Cilacap.

## **7. Rekomendasi Arah Pembangunan**

Ada beberapa alternatif strategi pembangunan yang efektif bila diterapkan dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Cilacap setelah memahami landasan teori dan hasil dari analisis, yaitu:

- a. Arah pengembangan investasi dilakukan melalui dua jalur. Pertama, kebijakan investasi dengan memprioritaskan pengembangan sektor Industri Pengolahan (non Migas); sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Pertambangan. Kedua, kebijakan fasilitas investasi dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor-sektor potensial, yakni sektor Kontruksi; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.. Kebijakan investasi harus bersifat inklusif, bukan investasi yang eksklusif pada sektor-sektor industri besar dan padat modal saja.
- b. Upaya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, perlu adanya pemerataan industrialisasi yang berbahan baku hasil sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diseluruh daerah Kabupaten Cilacap.
- c. Membangun sinergitas antara sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan (non Migas); Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Penggalaan sosialisasi program Dinas Pemerintahan yang menaungi atau bertanggungjawab atas sektor perekonomian daerah ke seluruh kecamatan, desa dan organisasi yang ada di Kabupaten Cilacap.

- e. Mengadakan pelatihan pembekalan untuk pematangan *skill* dalam persiapan memasuki dunia usaha agar menjadikan SDM yang kompetitif.
- f. Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk industri di daerah Kabupaten Cilacap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menganalisis sektor-sektor ekonomi non Migas yang menjadi sektor basis dan potensial bisa dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Klassen Typology*. Hasil analisis metode LQ menunjukkan bahwa terdapat dua sektor basis di Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016, yaitu: sektor Industri Pengolahan dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan lima belas sektor lainnya merupakan sektor non basis. Perlu pengembangan sektor non basis agar lebih banyak sektor basis di Kabupaten Cilacap.

Selanjutnya hasil analisis metode *Klassen Typology* menunjukkan bahwa Klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2014-2016 adalah:

- a. Sektor maju dan berkembang cepat terdapat tiga sektor, yaitu: sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Konstruksi, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- b. Sektor maju tapi tertekan terdapat dua sektor, yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan.
- c. Sektor berkembang cepat terdapat sepuluh sektor, yaitu: sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.
- d. Sektor relatif tertinggal terdapat dua sektor, yaitu: Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta sektor Industri Pengolahan masuk dalam kategori sektor maju tapi tertekan, hal itu berarti pemerintah harus melakukan prioritas pengembangan agar pertumbuhannya meningkat sebab kedua sektor tersebut merupakan sektor dominan di Kabupaten Cilacap.

2. Menurut pandangan ekonomi Islam bahwa dalam melihat pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Cilacap baiknya menerapkan konsep atau prinsip ekonomi yang berlandaskan sumber hukum Islam, yaitu Qur'an, Hadits, ijma' dan qiyas dalam menyusun arah kebijakan demi terwujudnya tujuan *maqashid syari'ah* yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Dalam melakukan kegiatan pembangunan ekonomi mulai dari penyusunan kebijakan sampai penerapannya, pemerintah haruslah terlebih dahulu memprioritaskan sektor yang menjadi tumpuan bagi masyarakat lemah atau miskin. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan seimbang dengan kesejahteraan masyarakat karena pembangunan ekonomi daerah yang merata.

## **B. Saran**

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel sektor ekonomi. Berkaitan dengan ketimpangan pembangunan sektoral ekonomi dapat dikaitkan dengan variabel lainnya seperti distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam, alokasi dana pembangunan, investasi daerah dan lain-lain.
2. Dalam penelitian lanjutan perlu dilakukan pendekatan secara regional untuk menentukan aspek lokasi yaitu di daerah mana sektor tersebut harus dikembangkan sesuai dengan potensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, sebuah studi komparasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Ambardi, U.M dan Socia, P. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*, Pusat Pengkajian Pengembangan Wilayah, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta, 2015.
- Arsyad, Lincolin. *Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi*, Ekonomi Pembangunan Modul 1, t.t. hlm. 1.22.
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE. Yogyakarta, 1999.
- Asih, Widi. "Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap," Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Asmuni Mth. "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam", Jurnal Almahwardi. 2003,Edisi X.
- Badri, Juarsa. "Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok", Ipteks Terapan. 2015, Vol. 8, i4.
- Basuki, Agus Tri dan Utari Gayatri, "Penentu sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir",Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 2015, Vol. 10, nomor 1.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Risalah Gusti,Surabaya, 1999.
- Ghufron, Muhammad. "Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur," Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.

- Heilbroner, Robert L. *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, terj. Sutan Dianjung, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Huda, Nurul. dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Huda, Nurul. dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Irawan dan M. Suparmoko. *Ekonomika Pembangunan*. BPFE. Yogyakarta, 2002.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Kornita, Sri Endang. “ Analisis Ekonomi Basis dan Potensi Sinergi Pembangunan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru,” Skripsi. Pekanbaru: Universitas Riau, 2008.
- Kuncoro, M. *Masalah, kebijakan, dan Politik: Ekonomika Pembangunan*. Erlangga, Jakarta, 2010.
- Kuncoro, M. *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE. Yogyakarta, 2000.
- Mushoffa. “Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Tegal,” Skripsi. Semarang: UNNES, 2009.
- Nurul Ma’rifah, Aula. “Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendekatan Location Quotient dan Shift Share Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2014),” Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Prasetyantoko, A. *Arsitektur Baru Ekonomi Global, Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*, PT. Elex Komputindo, Jakarta, 2001.
- Purnawa, Agung Eko. “Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Justitis Islamica*. 2013, Vol. 10, No. 1.
- Sadono, Sukirno. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.



- Santoso, Moh Fathoni. "Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Basis dan Non Basis Kota Kediri tahun 2009-2013", Skripsi. Surabaya: UNESA Surabaya. 2015.
- Simanjuntak, Damiana dan Sirojuzilam, *Potensi wilayah dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Toba Samosir*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2013, Vol.1, No. 3.
- Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Padang, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Suryana, *Ekonomi Pembangunan (Problematika dan Pendekatan)*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Syafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi dan ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma, Jakarta, 1997.
- Tambunan, Tulus T. H. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang: Kasus di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT. bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Purwokerto Edisi Revisi*, Stain Press, Purwokerto, 2014.
- Tohir, Moh. "Rekonstruksi Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Al-Ghozali, Ibn Kholdun, dan M. Umer Chapra," Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- "*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2012-2016*", Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, Agustus 2017, hlm. 56.
- "*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap 2012-2017*", No. 5, Tahun 2013. hlm. IV-10. Diakses tanggal 18 Maret 2017, pukul 12.41.

*“Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 2014”* BAPPEDA dan BPS  
Provinsi Jawa Tengah, Oktober 2015, hlm. 9.



## LAMPIRAN

### Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Dengan Migas Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014*)	2015 *)	2016 **)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.003.870,6	6.195.201,4	6.030.826,1	6.405.712,7	6.604.527,0
B	Pertambangan dan Penggalian	1.743.558,0	1.866.296,7	2.338.906,0	2.345.647,8	2.348.588,3
C	Industri Pengolahan	57.661.236,8	57.918.373,9	58.831.986,8	62.208.167,6	65.306.911,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39.527,0	43.657,4	52.780,0	60.848,0	70.413,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.852,7	29.973,1	31.270,4	31.300,9	31.940,4
F	Konstruksi	3.474.561,9	3.569.951,5	3.730.933,1	3.997.282,7	4.358.149,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.740.892,5	3.870.046,3	4.114.354,5	4.364.309,2	4.652.880,6
H	Transportasi dan Pergudangan	1.649.787,9	1.844.473,5	2.028.563,5	2.228.324,1	2.329.629,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	684.932,1	713.634,9	787.181,3	844.767,3	885.068,2
J	Informasi dan Komunikasi	1.004.837,3	1.058.971,9	1.253.535,0	1.416.984,6	1.515.055,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	559.132,9	581.527,4	615.958,4	662.798,3	716.562,8
L	Real Estate	563.714,2	610.020,7	680.423,8	730.538,8	774.942,9
M,N	Jasa Perusahaan	86.795,4	99.055,6	109.128,3	119.733,9	128.885,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	830.149,4	851.071,5	865.731,9	920.791,1	942.985,3
P	Jasa Pendidikan	962.194,4	1.038.630,1	1.113.730,2	1.158.706,0	1.238.907,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.011,4	209.901,7	240.651,9	263.244,9	289.864,1
R,S,T, U	Jasa lainnya	474.183,1	521.882,5	565.538,3	588.446,5	625.050,7
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>79.702.237,6</b>	<b>81.022.670,3</b>	<b>83.391.500,2</b>	<b>88.347.606,7</b>	<b>92.820.362,2</b>

Lampiran 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas 2012 – 2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014*)	2015 *)	2016 **)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.003.870,6	6.195.201,4	6.030.826,9	6.405.714,7	6.604.527,0
B	Pertambangan dan Penggalian	1.743.558,0	1.866.296,7	2.338.906,0	2.345.647,8	2.348.588,3
C	Industri Pengolahan	11.057.266,2	11.730.242,1	12.134.375,6	12.580.130,5	13.147.441,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	39.527,0	43.657,4	52.780,0	60.848,0	70.413,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.852,7	29.973,1	31.270,4	31.300,9	31.940,4
F	Konstruksi	3.474.561,9	3.569.951,5	3.730.933,1	3.997.282,7	4.358.149,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.740.892,5	3.870.046,3	4.114.354,5	4.364.309,2	4.652.880,6
H	Transportasi dan Pergudangan	1.649.787,9	1.844.473,5	2.028.563,5	2.228.324,1	2.329.629,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	684.932,1	713.634,9	787.181,3	844.767,3	885.068,2
J	Informasi dan Komunikasi	1.004.837,3	1.058.971,9	1.253.535,0	1.416.984,6	1.515.055,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	559.132,9	581.527,4	615.958,4	662.798,3	716.562,8
L	Real Estate	563.714,2	610.020,7	680.423,8	730.538,8	774.942,9
M,N	Jasa Perusahaan	86.795,4	99.055,6	109.128,3	119.733,9	128.885,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	830.149,4	851.071,5	865.731,9	920.791,1	942.985,3
P	Jasa Pendidikan	962.194,4	1.038.630,1	1.113.730,2	1.158.706,0	1.238.907,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.011,4	209.901,7	240.651,9	263.244,9	289.964,1
R,S,T, U	Jasa lainnya	474.183,1	521.882,5	565.538,3	588.446,5	625.050,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		33.098.267,0	34.834.538,5	36.693.889,0	38.719.569,6	40.660.892,5

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Atas Dasar  
 Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas 2012 - 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014*)	2015 *)	2016 **)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,10	3,19	-2,65	6,22	3,10
B	Pertambangan dan Penggalian	6,98	7,04	25,32	0,29	0,13
C	Industri Pengolahan	5,19	6,09	3,45	3,67	4,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,27	10,45	20,90	15,29	15,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-3,62	0,40	4,33	0,10	2,04
F	Konstruksi	4,28	2,75	4,51	7,14	9,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,56	3,45	6,31	6,08	6,61
H	Transportasi dan Pergudangan	8,26	11,80	9,98	9,85	4,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,80	4,19	10,31	7,32	4,77
J	Informasi dan Komunikasi	9,99	5,39	18,37	13,04	6,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,58	4,01	5,92	7,60	8,11
L	Real Estate	6,72	8,21	11,54	7,37	6,08
M,N	Jasa Perusahaan	7,02	14,13	10,17	9,72	7,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	2,52	1,72	6,16	2,41
P	Jasa Pendidikan	13,37	7,94	7,23	4,04	6,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,57	8,75	14,65	9,39	10,11
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,04	10,06	8,37	4,05	6,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,95	5,25	5,34	5,52	5,01

Tabel Perhitungan Analisis LQ 2014

Perhitungan Analisis Location Qoution (LQ)						
Kategori	uraian	2014				LQ
		Cilacap	vi/vt	Jateng	Vi/Vt	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 6.030.826	0,072319434	Rp 107.793.381	0,140913905	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	Rp 2.338.906	0,028047295	Rp 15.566.649	0,020349647	1,38
C	Industri Pengolahan	Rp 58.831.987	0,705491407	Rp 271.526.773	0,354955912	1,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Rp 52.780	0,000632918	Rp 866.488	0,001132725	0,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	Rp 31.270	0,000374983	Rp 567.980	0,000742497	0,51
F	Konstruksi	Rp 3.730.933	0,044739969	Rp 76.681.877	0,1002431	0,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	Rp 4.114.355	0,049337816	Rp 110.899.194	0,144974007	0,34
H	Transportasi dan Pergudangan	Rp 2.028.564	0,024325783	Rp 24.868.281	0,032509292	0,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 787.181	0,009439587	Rp 23.471.641	0,030683522	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	Rp 1.253.535	0,015031928	Rp 30.130.162	0,039387935	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp 615.958	0,007386345	Rp 20.106.852	0,02628487	0,28
L	Real Estate	Rp 680.424	0,00815939	Rp 13.776.864	0,018009934	0,45
M,N	Jasa Perusahaan	Rp 109.128	0,001308626	Rp 2.526.616	0,003302942	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp 865.732	0,010381536	Rp 21.075.647	0,027551336	0,38
P	Jasa Pendidikan	Rp 1.113.730	0,01335544	Rp 27.266.220	0,035644021	0,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp 240.652	0,002885808	Rp 5.916.711	0,007734675	0,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya	Rp 565.538	0,006781726	Rp 11.917.818	0,015579679	0,44
PDRB		Rp 83.391.500		Rp 764.959.151		

Tabel Perhitungan Analisis LQ Tahun 2015-2016

Perhitungan Analisis Location Qoution (LQ)									
2015				LQ	2016				LQ
Cilacap	vi/vt	Jateng	Vi/Vt		Cilacap	vi/vt	Jateng	Vi/Vt	
Rp 6.405.713	0,072505786	Rp 113.826.299	0,14108797	0,51	Rp 6.604.527	0,07115386	Rp 116.250.932	0,13686506	0,52
Rp 2.345.648	0,026550213	Rp 16.040.766	0,01988257	1,34	Rp 2.348.588	0,02530251	Rp 19.044.525	0,02242158	1,13
Rp 62.208.168	0,70412963	Rp 284.575.766	0,35273235	2,00	Rp 65.306.912	0,70358389	Rp 296.227.398	0,34875575	2,02
Rp 60.848	0,000688734	Rp 887.584	0,00110016	0,63	Rp 70.413	0,00075859	Rp 954.806	0,00112412	0,67
Rp 31.301	0,000354293	Rp 577.262	0,00071552	0,50	Rp 31.940	0,00034411	Rp 589.805	0,00069439	0,50
Rp 3.997.283	0,045244946	Rp 81.286.113	0,10075433	0,45	Rp 4.358.150	0,04695252	Rp 86.875.268	0,10228037	0,46
Rp 4.364.309	0,049399292	Rp 115.299.086	0,14291349	0,35	Rp 4.652.881	0,0501278	Rp 121.181.124	0,14266949	0,35
Rp 2.228.324	0,025222235	Rp 26.807.882	0,03322843	0,76	Rp 2.329.630	0,02509826	Rp 28.592.167	0,03366226	0,75
Rp 844.767	0,009561858	Rp 25.064.275	0,03106723	0,31	Rp 885.068	0,00953528	Rp 26.668.737	0,03139775	0,30
Rp 1.416.985	0,016038743	Rp 33.001.271	0,04090516	0,39	Rp 1.515.055	0,01632245	Rp 35.742.556	0,04208058	0,39
Rp 662.798	0,007502165	Rp 21.719.195	0,02692099	0,28	Rp 716.563	0,00771989	Rp 23.820.513	0,02804447	0,28
Rp 730.539	0,008268914	Rp 14.822.295	0,01837227	0,45	Rp 774.943	0,00834885	Rp 15.829.478	0,01863643	0,45
Rp 119.734	0,001355259	Rp 2.741.143	0,00339765	0,40	Rp 128.885	0,00138854	Rp 3.032.330	0,00357004	0,39
Rp 920.791	0,010422366	Rp 22.194.695	0,02751038	0,38	Rp 942.985	0,01015925	Rp 22.720.444	0,02674933	0,38
Rp 1.158.706	0,013115307	Rp 29.324.082	0,03634727	0,36	Rp 1.238.908	0,01334737	Rp 31.563.635	0,03716064	0,36
Rp 263.245	0,002979649	Rp 6.307.617	0,00781831	0,38	Rp 289.864	0,00312285	Rp 6.929.496	0,00815826	0,38
Rp 588.447	0,006660582	Rp 12.300.031	0,01524592	0,44	Rp 625.051	0,00673398	Rp 13.360.351	0,01572947	0,43
Rp 88.347.607		Rp 806.775.362			Rp 92.820.362		Rp 849.383.565		

Tabel Perhitungan Analisis Klassen Typology 2014-2016

kategor ori	uraian	2014-2016						klasiikasi TK
		pertumbu han sektor i (ri)	pertum buan PDRB (r)	</>	kontribusi sektor i PDRB (yi)	rata2 sektor PDRB	</>	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,22	5,29	<	16,41	5,88	>	<b>sektor maju tapi tertekan</b>
B	Pertambangan dan Penggalian	8,58	5,29	>	6,07	5,88	>	<b>sektor maju dan tumbuh cepat</b>
C	Industri Pengolahan	3,88	5,29	<	32,63	5,88	>	<b>sektor maju tapi tertekan</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,30	5,29	>	0,16	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	2,16	5,29	<	0,08	5,88	<	<b>sektor relatif tertinggal</b>
F	Konstruksi	6,89	5,29	>	10,4	5,88	>	<b>sektor maju dan tumbuh cepat</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	6,33	5,29	>	11,31	5,88	>	<b>sektor maju dan tumbuh cepat</b>
H	Transportasi dan Pergudangan	8,13	5,29	>	5,67	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	5,29	>	2,17	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
J	Informasi dan Komunikasi	12,78	5,29	>	3,6	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,21	5,29	>	1,7	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
L	Real Estate	8,33	5,29	>	1,88	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
M,N	Jasa Perusahaan	9,18	5,29	>	0,31	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,50	5,29	<	2,35	5,88	<	<b>sektor relatif tertinggal</b>
P	Jasa Pendidikan	6,06	5,29	>	3,03	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>



Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,48	5,29	>	0,68	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	6,21	5,29	>	1,53	5,88	<	<b>sektor berkembang cepat</b>

